



LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Desa Cimanggu Kec.

Palabuhanratu 43364 Kabupaten Sukabumi

Telp/Fax. (0266) 6446547 e-mail : penramdinkes@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (~~pertama~~/**kedua**/~~ketiga~~/~~keempat~~/~~kelima~~) dalam masa RENSTRA Tahun 2021 – 2026, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2016-2021).

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja, maka disusulah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya sebagai sarana untuk mengevaluasi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 ini diharapkan dapat umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya .



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukabumi

AGUS SANUSI, SKM., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680817 200604 1 013



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), ada satu (satu) Indikator Kinerja Utama Program belum mencapai target yaitu : Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar yaitu 33% dari target 37% dan Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri hanya mencapai 34% dari Target 31% yang telah ditetapkan.

Sedangkan dari 12 (dua belas) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada 7 (tujuh) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mencapai target 100% yaitu : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar (98,2%), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (96,3%), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (96,6%), Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar (98,5%), Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar (68,9%), Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sebesar (96,0%), Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sebesar (94,8%), Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar (80,1%) dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus HIV (67,8%).

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan pemenuhan target SPM diperlukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan maksimal. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Issue Strategis	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	5
1.5 Landasan Hukum	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Startegis	9
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	19
3.2 Realisasi Anggaran	29
3.3 Capaian Progran Kegiatan RSUD Sekarwangi	59
3.4 Progran Kegiatan RSUD Palabuhanratu	60
3.5 Progran Kegiatan RSUD Sagaranten	64
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	76

L A M P I R A N

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Pengukuran Capaian Kinerja
3. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2023	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tahun 2023	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Programh Tahun 2022 dan Tahun 2023	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga terdapat dalam piagam PBB Tahun 1948 yang menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang.

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma- norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- a. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
- c. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- d. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- e. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
- f. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, jajaran kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun disadari bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai masalah kesehatan/penyakit baru (*new emerging diseases*) atau penyakit lama yang muncul kembali (*re emerging diseases*).

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan mengembangkan kemampuan hidup sehat, serta berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat *private goods* yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pemerintah bertugas sebagai *regulator* pembangunan kesehatan untuk mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi social sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjalankan pemerintahannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Secara teoritis, fungsi Pemerintah Daerah meliputi Pemberian Pelayanan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pembangunan, Fungsi Perwakilan, Fungsi Koordinasi dan Perencanaan.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemberi amanat serta pemilik kekuasaan dan kedaulatan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja, maka Pemerintah Daerah maupun unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) setiap tahun untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada Tahun anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk Laporan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review Atas Laporan Kinerja, Rencana Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukabumi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah ini juga adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - Tahun 2026 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertanggungjawabkan kinerja tugas pokok dan fungsi serta anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada *stake holder* guna mewujudkan *good governance* yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

1.3 Issue Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Sesuai perkembangan dan tantangan yang ada saat ini, maka issue strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukabumi adalah :

1. Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan belum sesuai dengan standar kebutuhan;
3. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Pemenuhan rasio puskesmas dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk.
5. Belum optimalnya monitoring evaluasi secara berjenjang dimulai dari bidang, sub koordinator, para penanggungjawab pelaksana program di Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis;
6. Belum optimalnya pembiayaan untuk mendukung capaian target indikator standar pelayanan minimal dan indikator program bidang kesehatan;
7. Fasilitas pelayanan kesehatan belum dilakukan re-Akreditasi terkait dengan adanya masa pandemi Covid-19;
8. Belum semua Desa Siaga di Kabupaten Sukabumi menjadi Desa Siaga Aktif Mandiri;
9. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas;
10. Masih terdapat penduduk yang belum menggunakan jamban sehat;
11. Ratio kematian ibu dan ratio kematian bayi masih tinggi;
12. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan;
13. Masih terdapat Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terisi dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang sesuai standar;
14. Perlu peningkatan dan penguatan terhadap Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar;
15. Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005–2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diatur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan yang tercantum dalam BAB III Pasal 4 ayat (1) dan (2), tugas pokok Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

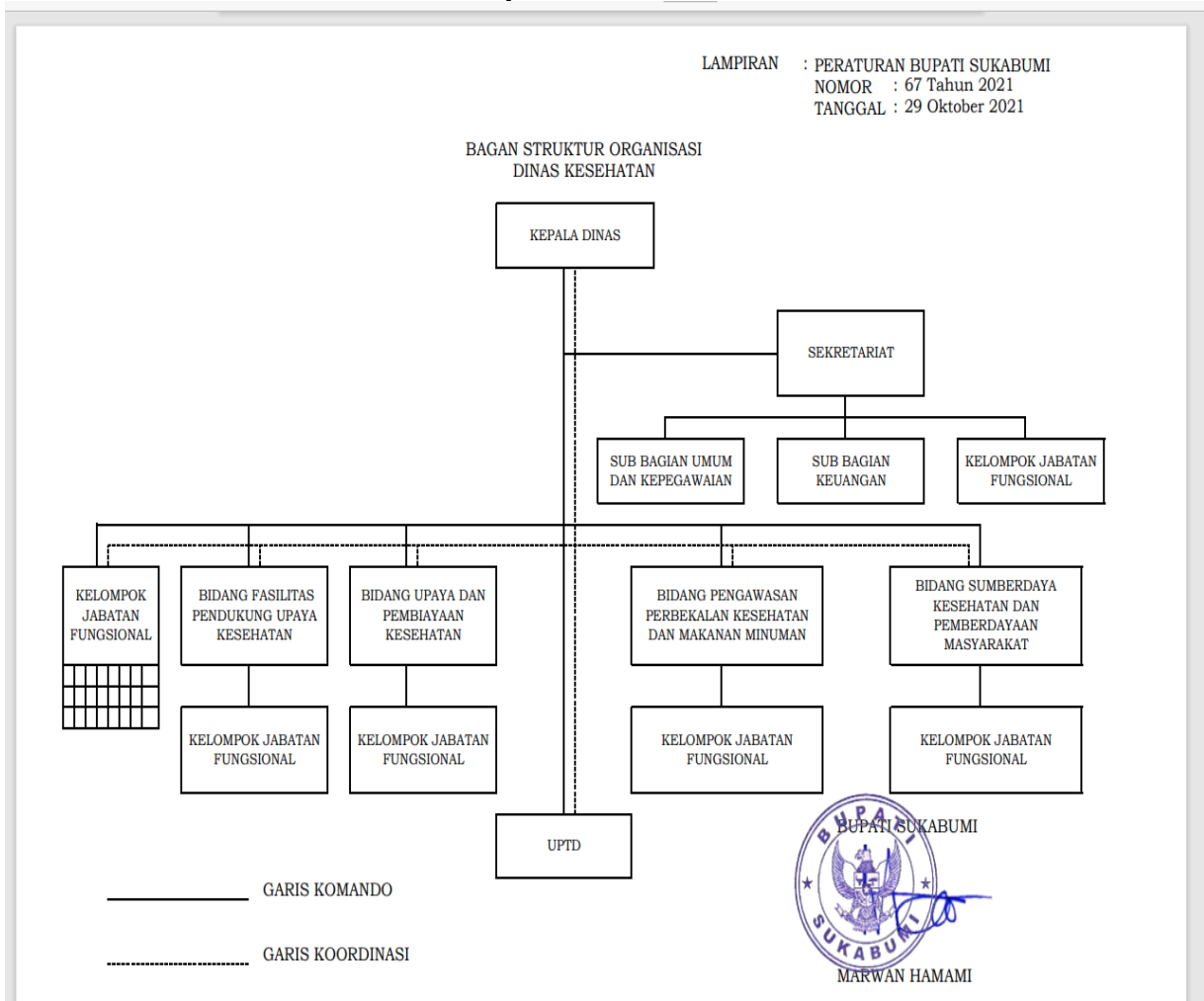
- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penunjang Upaya Kesehatan; Bidang Upaya dan Pembiayaan Kesehatan; Bidang Pengawasan Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman; Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - d. Melaksanakan penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang kesehatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesehatan;



- f. Melaksanakan penerbitan sertifikat di bidang kesehatan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- h. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi, maka Dinas Kesehatan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi





Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada Tahun 2023 jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
	a. Bidang PUK	
	b. Bidang UPK	
	c. Bidang SDKPM	
	d. Bidang PPKMM	
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Ketua Tim	21
6.	Staf / Pelaksana	
	a. Staf Gol. IV	204
	b. Staf Gol. III	939
	c. Staf Gol. II	260
	d. Staf Gol. I	4
	e. Staf Non-PNS	1607

1.5 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan sebagai acuan pelaksanaan program serta menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sukabumi.

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikan secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana strategis berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dan mengoptimalkan implementasi program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Misi Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kedalam program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi;
- b. Sebagai acuan / pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pembangunan daerah tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;

- c. Sebagai media akuntabilitas dalam menciptakan tata pemerintah yang baik (Good Governance), agar terjamin sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah Kepala Daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021 – 2026).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif
menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2021 – 2026 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin									
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing									
1	Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,97	71,08	71,26	71,45	71,63	71,81	72,00
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	85,22	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	4,75	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,00

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	60%	62%	64%	66%	68%	70%
2	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	15%	16%	17%	18%	19%	20%
3	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	35%	37%	39%	41%	43%	45%
5	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28%	31%	34%	37%	40%	43%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

No IKK	IKK Outcome	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	ratio	0,056	0,06	0,064	0,068	0,071
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan , Bappenas dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan review terhadap , Visi, Misi, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 maka perencanaan strategik Dinas Kesehatan Sukabumi dalam RPJMD dituangkan dalam Misi ke 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan kata lain, perjanjian kinerja merupakan penugasan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang kemudian diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Pada tabel 2.1 berikut, disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari program/kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target 2023
1	Angka harapan Hidup (AHH)	Data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS)	Tahun	71,45
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas diwilayah tertentu dalam satu tahun	Per 100.000 KH	83,00
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (0-12 bulan) dalam satu tahun diwilayah tertentu / jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun diwilayah tertentu x 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Per 1.000 KH	4,20

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Sasaran Strategi	Program	Indikator Program	Satuan	Formulasi	Target
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang tersedia / Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang harus tersedia x 100%	64%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan layanan UKM dan UKP Rujukan / Jumlah Penduduk x 100%	17%



Sasaran Strategi	Program	Indikator Program	Satuan	Formulasi	Target
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin / Jumlah seluruh Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang ada x 100%	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Kebutuhan x 100%	39%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	Total Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin / Jumlah Seluruh Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman x 100%	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri / Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan Siaga Aktif x 100%	34%

Pada tabel 2.2 diatas, disajikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari program/kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Sub Koordinator
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat	%	100



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
		waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		
02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	64
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	100
02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Lanjutan yang disediakan	Jenis	21
02.02.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	Faskes	40
02.02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin RS Kelas C,D dan FKTP	Berkas	3
02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	17
02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan	Jenis	38
02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	39
03.02.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Penerbitan Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	1970
03.02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Uji Kompetensi Untuk Perawat dan Perawat Gigi	Orang	60
03.02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data Kebutuhan SDM untuk Pemenuhan Kebutuhan SDM (9 Profesi Nakes) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	767
02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100
04.02.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kefarmasian	Sarana	45
04.02.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemberian rekomendasi sertifikat produksi PKRT	Rekomendasi	1
04.02.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	rekomendasi teknis laik hygiene sanitasi bagi sarana (Pangan Industri Rumah Tangga) P-IRT	Dokumen	100



Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
04.02.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	rekomendasi teknis laik hygiene sanitasi bagi sarana Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum, Catering/Jasaboga	Dokumen	20
04.02.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terdata dan terbinanya sarana makanan jajanan di Kabupaten Sukabumi	Sarana	100
04.02.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	terbina dan terawasinya sarana pangan dan pangan produk olahan yang sudah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	Sarana	25
02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	34%
05.02.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	116
05.02.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Promkes	Kali	3
05.02.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa yang mendukung UKBM melalui ADD	Desa	231

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Selaku pengemban amanah bidang kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, Pengukuran kinerja berawal dari penetapan kinerja kegiatan, indikator kinerja utama, dengan melihat rencana dan realisasi masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kerjanya.

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat melalui Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD Tahun berjalan. Selain itu dibandingkan pula realisasi Kinerja Program sampai dengan Tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan.



3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Capaian Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

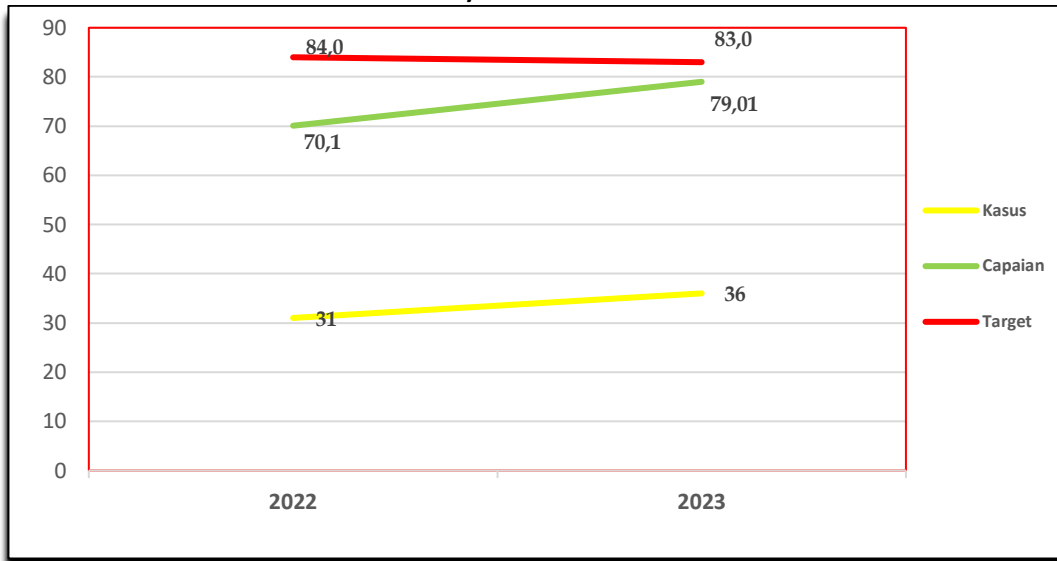
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023
1	Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,26	71,54	71,45	71,83
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	84,00	70,1	83,00	79,01
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	4,25	3,45	4,20	3,95

Dari tabel di atas gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

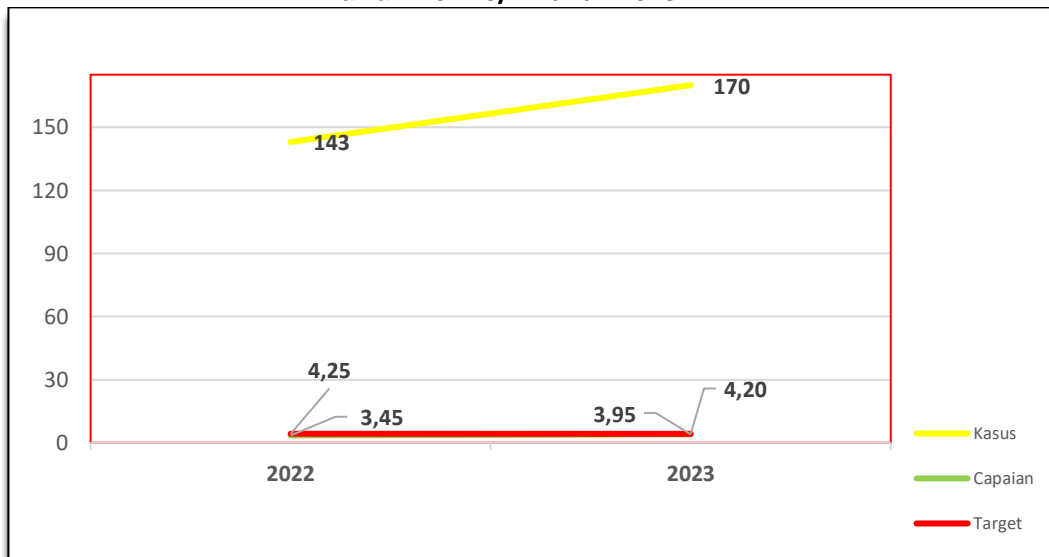
1. Target Kinerja Nasional AKI menggunakan SDGs Tahun 2023 Jumlah kematian sebesar :
 - a. Perbandingan dengan kematian ibu (*sumber AM*) sebesar 36 Kasus.
Katagori Tercapai
 - b. Perbandingan dengan kematian ibu (*sumber MPDN*) sebesar 40 Kasus.
Katagori Tidak Tercapai
2. Target Kinerja Nasional AKB menggunakan SDGs Tahun 2023 Jumlah kematian sebesar :
 - a. Perbandingan dengan kematian ibu (*sumber AM*) sebesar 170 Kasus.
Katagori Tercapai
 - b. Perbandingan dengan kematian ibu (*sumber MPDN*) sebesar 330 Kasus.
Katagori Tidak Tercapai



Grafik Kasus Kematian Ibu Tahun 2022 S/D Tahun 2023



Grafik Kasus Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022 S/D Tahun 2023



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kasus kematian ibu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu dihitung dari banyaknya kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas diwilayah tertentu dalam satu tahun per 100.000 Kelahiran Hidup pada periode waktu yang sama. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian Ibu pada tahun 2022 sebanyak 32 kasus, sedangkan pada tahun 2023 angka kematian ibu sebanyak 36 kasus. Jika dibanding dengan tahun 2023 angka kematian ibu meningkat sebanyak 4 kasus. Penyebab peningkatan kejadian adalah 40% atau 16 Kasus dengan kematian lain-lain, untuk penyebab kematian secara langsung seperti perdarahan 7 kasus, Hipertensi 10 kasus, Inpeksi 4 kasus, jantung 3 kasus.

2. Angka Kematian Bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Menurut definisi operasional Kementerian Kesehatan RI yang dimaksud dengan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah Kematian Bayi (0-12 bulan) di suatu wilayah pada suatu kurun waktu 1 (satu) tahun.

Khusus untuk indikator angka kematian bayi, indikator ini merupakan Indikator negatif, sehingga semakin kecil capaian indikator dari target yang ditetapkan, maka artinya tingkat keberhasilan kegiatan semakin tinggi. Pada Tahun 2022 realisasi angka kematian bayi 143/1.000 Kelahiran Hidup atau 3,45%. Sedangkan Tahun 2023, realiasi angka kematian bayi adalah 170/1.000 Kelahiran Hidup adalah 3,95%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 maka terjadi peningkatan kasus sebanyak 7 kasus, meskipun demikian angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 4,20%. Akan tetapi yang menjadi titik perhatian adalah bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sukabumi termasuk pada katagori tinggi karena angka kematiannya < 20/1.000 Kelahiran Hidup (KH). Hal ini harus terus dipertahankan dan terus diupayakan untuk menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Target 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri							
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang tersedia / Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang harus tersedia x 100%	64	72,42	72,35
		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kesehatan layanan UKM dan UKP Rujukan / Jumlah Penduduk x 100%	17	23,0	25,22
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin / Jumlah seluruh Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas	100	100	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Target 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
		Tingkat Daerah yang berizin		Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang ada x 100%			
		Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar / Jumlah Kebutuhan x 100%	39	67,45	43,0
		Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	Total Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin / Jumlah Seluruh Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman x 100%	100	100	100
		Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri / Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan Siaga Aktif x 100%	34	28,87	31,0

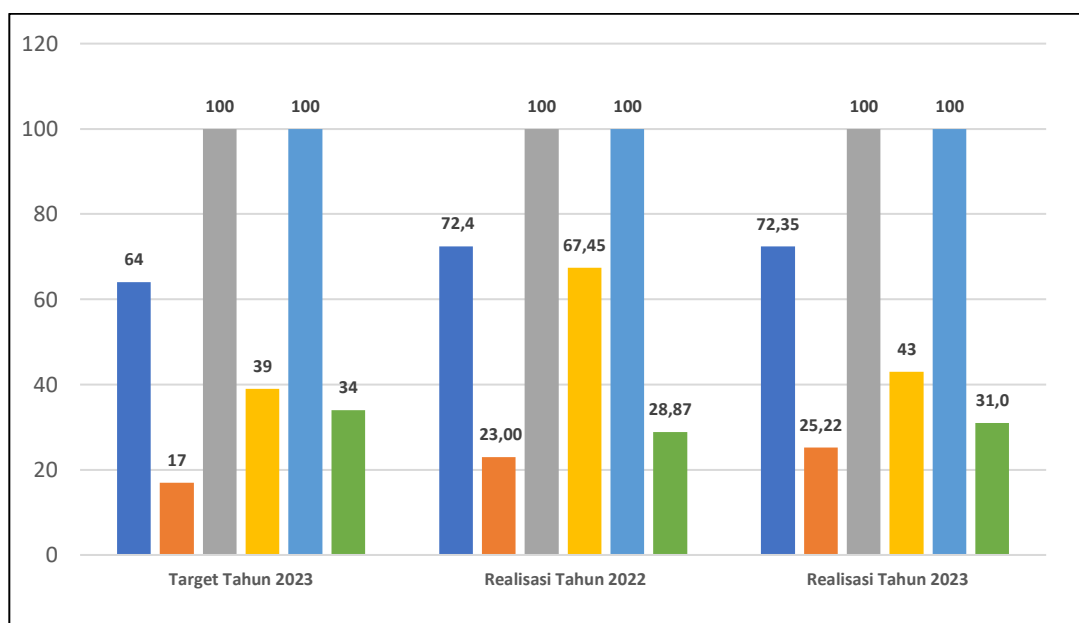
Dari tabel di atas gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang tersedia yaitu 64%, sedangkan capaian kinerjanya adalah 72,42% berdasarkan hasil Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Puskesmas dan 3 RSUD Pemerintah dan 5 RSUD Swasta sampai 30 Desember 2023. Capaian Kinerja meningkat sebesar 10,42%.
2. Target Persentase Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Target Tahun 2023 yaitu 17% capaian kinerjanya 25,22%. Angka tersebut dapat dilihat dari hasil kunjungan baru ke Faskes sebanyak 601.925 kasus dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 2.539.454 jiwa. Capaian Kinerja meningkat sebesar 8,22%.
3. Target presentase Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin yaitu 100% dan capaian kinerjanya 100%. Data tersebut dilihat dari data Sistem Informasi Kesehatan tentang perizinan RSU yang ada di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 RSUD dan 6 RS swasta semua berizin.
4. Target presentase Jumlah Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 39% sedangkan capaian kinerjanya 43%. Angka tersebut didapat dari Data Tenaga kesehatan Kondisi existing ada pada tahun 2023 sebanyak 1.595 PNS dan P3K dibandingkan dengan Rencana Kebutuhan Tenaga kesehatan sebanyak 686

Orang PNS dan P3K. hal itu disebabkan sebagian Pegawai Non ASN puskesmas dan Labkesda yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK dan mengundurkan diri atas permintaan pribadi. Capaian Kinerja meningkat sebesar 4%.

5. Target Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin yaitu 100% dan capaian kinerjanya 100%. Data tersebut dilihat dari jumlah rekomendasi yang sudah di keluarkan oleh masing-masing Subkoordinator pada bidang Pengawasan Perbekalan Kesehatan Makanan dan minuman. Jumlah PKRT yang telah diberikan rekomendasi sebanyak 5 dari 5 pengajuan, pengajuan rekomendasi izin apotek 33 dari 33 pengajuan, dan rekomendasi izin Toko Obat 5 dari 5 pengajuan. Rekomendasi SLHS : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi rekomendasi sebanyak 10 dari 10 pengajuan.
6. Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri yaitu 34%, sementara capaian kinerjanya hanya 31%. Ada kesenjangan dari target sekitar 3% Dari 381 Desa di Kabupaten Sukabumi hanya 271 desa yang strata nya desa siaga aktif mandiri. Hal itu disebabkan Kurang optimalnya Forum Desa Siaga disebabkan tidak ada dukungan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Forum dan Kader Desa Siaga.

**Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022 dan Tahun 2023**



Dari grafik di atas dapat disimpulkan capaian kinerja antara Tahun 2022 dan Tahun 2023 gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang tersedia Target Tahun 2023 yaitu 64%, sementara capaian kinerja Tahun 2022

adalah 72,42% dan Tahun 2023 72,35%, ada penurunan kinerja 0,07% hal itu disebabkan karena adanya kondisi sarana dan prasarana yang rusak.

2. Target Persentase Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Target Tahun 2022 yaitu 16% capaian kinerjanya adalah 23% dan Target Tahun yaitu 17% 2023 capaian kinerjanya 25,22%, ada Peningkatan kinerja 2,22%. Hal itu dapat dilihat dari Jumlah Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan terus meningkat dan Pelayanan terhadap masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya. dan Angka tersebut dapat dilihat dari hasil kunjungan baru ke Faskes sebanyak 601.925 kasus dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 2.539.454 jiwa.
3. Target presentase Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin yaitu 100% dan capaian kinerjanya 100%. Data tersebut dilihat dari data Sistem Informasi Kesehatan tentang perizinan RSU yang ada di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 RSUD dan 6 RS swasta semua berizin.
4. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2022 yaitu 67,45% sedangkan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 43%. Capaian Kinerja meningkat sebesar 4%.
5. Target Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin yaitu 100% dan capaian kinerjanya 100%. Data tersebut dilihat dari jumlah rekomendasi yang sudah di keluarkan oleh masing-masing Subkoordinator pada bidang Pengawasan Perbekalan Kesehatan Makanan dan minuman. Jumlah PKRT yang telah diberikan rekomendasi sebanyak 5 dari 5 pengajuan, pengajuan rekomendasi izin apotek 32 dari 32 pengajuan, dan rekomendasi izin Toko Obat 5 dari 5 pengajuan. Rekomendasi SLHS : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi rekomendasi sebanyak 10 dari 10 pengajuan.
6. Capaian Desa Siaga Aktif Mandiri Tahun 2022 yaitu 28,87%, sementara capaian kinerja Tahun 2023 yaitu 33%. Meskipun belum mencapai target 34% namun ada peningkatan kinerja sekitar 2%.

Sedangkan Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	45.563	44.730	98,2
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	100	43.492	41.867	96,3
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	42.995	42.995	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	200.096	193.376	96,6
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	396.561	390.681	98,5
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	1.597.709	1.101.566	68,9
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	318.454	305.633	96,0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	172.455	163.475	94,8
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	14.180	14.180	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	3.572	3.572	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	7.682	7.682	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	46.432	46.432	100

Dari tabel di atas capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar (98,2%) masalah yang di hadapi adalah adanya K1 akses tidak murni sehingga tidak bisa mencapai inikator k4, adanya persalinan prematurus/abortus yang meningkat sehingga ibu hamil tidak melalui K4, Ibu pekerja di daerah industry memiliki peningkatan dropout K4.

Upaya Pemecahan masalah nya yaitu :

- Pemerintah Daerah Perlu Memerhatikan Anggaran khususnya untuk kegiatan yang mendukung SPM



- Diperlukan data sasaran pembandingan (data dari kelurahan/desa/kecamatan/jika ada desa dengan sasaran yang tidak sesuai
 - Peningkatan SDM pengelola program di Puskesmas
 - Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas termasuk logistik ibu hamil seperti USG, pelatihan kompetensi petugas gadar maternal,
 - Peningkatan kerja sama dengan Lintas Program Lintas Program dan Lintas Sektor terkait serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar (96,3%), permasalahan nya Untuk SPM pada persalinan faskes : masih ada persalinan di rumah dukun dan lolos. Dan masih ada tenaga kesehatan yang menolong persalinann di rumah pasien karena pasien tidak bersedia dibawa ke faskes.
Adapun Tindak lanjutnya adalah : peningkatan P4K, desa siaga, penguatan ANC terpadu dengan USG, pemanfaatan Buku KIA, kemitraan dukun paraji dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan Balita (96,6%), pada kunjungan balita belum mencapai dikarenakan ; banyak yang data berpindah diluar wilayah kab sukabumi, data balita tidak kunjungan dikarenakan sakit dan pemanfaatan serta logistik buku KIA bagi balita
Adapun Tindak lanjutnya adalah peningkatan kunjungan balita dengan melibatkan lintas sektor dan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta penggiatan pelayanan di PAUD
4. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar (98,5%), hal tersebut dikarenakan dikarenakan : kegiatan khusus penjangingan khusus anak sekolah telah dilaksanakan namun kualitas pembinaan minimal 4x belum terlaksana, SDM kesehatan di puskesmas untuk kegiatan anak usia sekolah dan remaja kurang
Pemecahan masalahnya adalah :
- Puskesmas membagi tim untuk menjadwalkan penjangingan dengan berkoordinasi dengan guru UKS di Sekolah
 - Menambah SDM untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar (68,9%), masalah yang dihadapi masih rendahnya minat masyarakat usia produktif yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun dating ke Posbindu PTM
Pemecahan masalahnya yaitu : Optimalisasi Kegiatan Deteksi Dini Program Penyakit tidak menular



6. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sebesar (96,0%), dikarenakan sarana posbindu dan SDM tiap desa masih terbatas, Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut tidak hanya dilayani tapi harus dilakukan skrining lengkap.

Pemecahan masalahnya yaitu :

- Posbindu dilengkapi sesuai SOP baik sarana dan prasarana nya yaitu Posbindu Kit
- Peningkatan SDM Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- Perencanaan logistik pada SPM lansia untuk PKM terutama pemeriksaan lab colestero; serta pemeriksaan yang terkait buku kesehatan lansia serta format GP2SP yang wajib ada untuk semua sasaran lansia

7. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sebesar (84,8%), masalah yang dihadapi adalah penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan secara teratur ke FKTP.

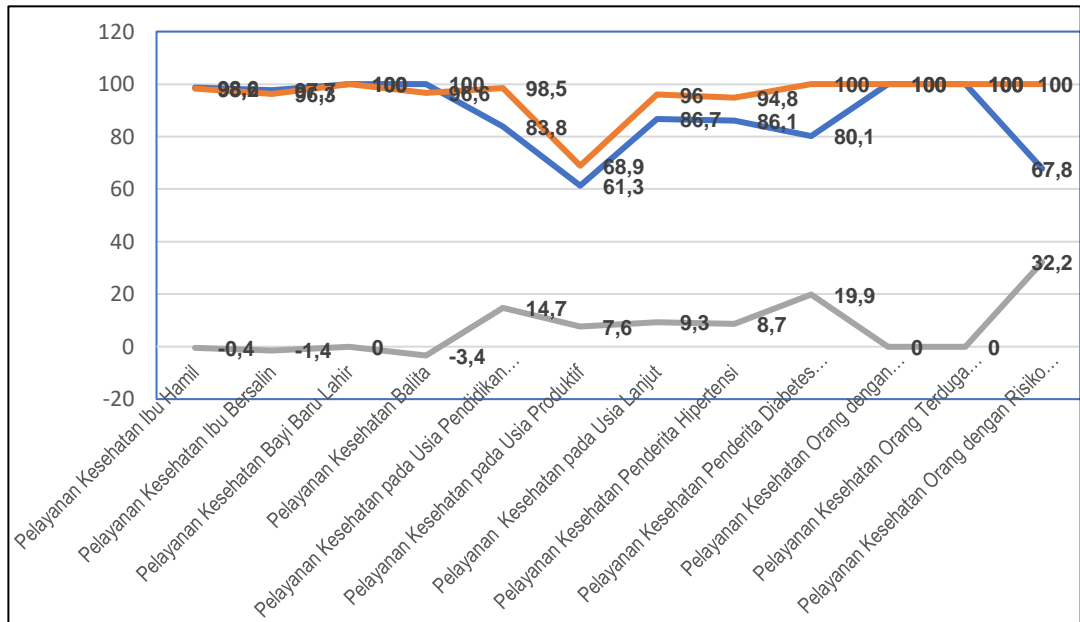
Pemecahan masalahnya yaitu : Pelaksanaan Skirining dan Kunjungan Rumah kepada masyarakat yang beresiko

Jika dibandingkan antara Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2022 s/d Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,6	98,2	-0,4
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97,7	96,3	-1,4
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	0
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	96,6	-3,4
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	83,8	98,5	14,7
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61,3	68,9	7,6
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86,7	96	9,3
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	86,1	94,8	8,7
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80,1	100	19,9
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	0
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	0
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	67,8	100	13,7

Grafik
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2022 s/d Tahun 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 s/d Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dari 12 (dua belas) indikator SPM, ada 3 (tiga) indikator SPM yang mengalami penurunan kinerja yaitu : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengalami **penurunan kinerja sebanyak 0,4% - 3,4%**. Hal tersebut disebabkan karena banyak yang data berpindah diluar wilayah kab sukabumi Berdasarkan Surat Edaran dari KEMENKES-RI Nomor : KG.01.10/B.III/552/202 tanggal 7 Februari 2024 Perihal : Penyampaian Capaian Data Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2023 Data kematian ibu dan bayi berdasarkan Alamat Domisili yang diterima melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), terkait dengan kinerja nasional, provinsi, dan kabupaten/kota data kematian yang digunakan adalah data yang dilaporkan di MPDN berdasarkan Alamat Domisili (AD) diterima. Alamat domisili ditetapkan apabila sasaran sudah tinggal disuatu wilayah selama minimal 6 bulan.
2. Sedangkan ada 6 (enam) indikator yang kinerja Capaian kinerja nya meningkat sekitar **7,6% - 19,9%**.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dibantu dengan RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Sagaranten, UPTD Labkesda, Gudang Farmasi dan UPTD Puskesmas tahun 2023 ada ada 5 (lima) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 88 (delapan puluh delapan) Sub Kegiatan.

Adapun Program Kegiatan Pada tahun 2023 urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dibantu dengan RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Sagaranten, UPTD Labkesda, Gudang Farmasi dan UPTD Puskesmas, program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2016–2021, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;**
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
 - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;**
 - 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;



- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
- 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
- 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
- 5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
- 6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dibantu dengan RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Sagaranten, UPTD Labkesda, Gudang Farmasi dan UPTD Puskesmas selaku UPT (Unit Pelaksana Teknis). Anggaran untuk pelaksanaan program-program urusan kesehatan adalah Rp. 900.749.718.583,- dengan realisasi sebesar Rp. 861.141.568.711,- atau 95,46%. **(rincian terlampir).**

Anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dibantu dengan RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Sagaranten, UPTD Labkesda, Gudang



Farmasi dan UPTD Puskesmas selaku UPT (Unit Pelaksana Teknis). Dengan rincian sebagai berikut :

A. DINAS KESEHATAN

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan adalah Rp. 406.044.965.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 399.964.576.865,- atau 98,50%.

B. UPTD LABKESDA

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) adalah Rp. 1.820.416.318,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.651.520.610,- atau 90,72%

C. UPTD GUDANG FARMASI

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Gudang Farmasi adalah Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.907.500,- atau 99,91%.

D. UPTD PUSKESMAS

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Puskesmas (58 Puskesmas) di Kabupaten Sukabumi adalah Rp. 204.862.613.632,- dengan realisasi sebesar Rp. 184.010.122.573,- atau 89,82%.

E. RSUD SEKARWANGI

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Sekarwangi adalah Rp. 172.635.344.185,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.896.111.159,- atau 95,52%

F. RSUD PALABUHANRATU

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Palabuhanratu adalah Rp. 102.727.634.583,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.189.591.243,- atau 95,58%.

G. RSUD SAGARANTEN

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Sagaranten adalah Rp. 12.558.744.443,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.329.738.761,- atau 98,18%

Adapun Penjabaran Program Kegiatan dan Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PELAKSANA DINAS KESEHATAN

Adapun Anggaran untuk pelaksanaan program urusan kesehatan adalah Rp. 406.044.965.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 399.964.576.865,- atau 98,50%. Pagu Anggaran tersebut tidak termasuk dengan RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Sagaranten UPTD Labkesda dan UPTD Farmasi selaku UPT (Unit Pelaksana Teknis). Dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.659.322.630,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.604.065.855,- atau 99,19%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 55.992.500,- terealisasi Rp. 55.817.950,- atau 99,69%. Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 25.992.500,- terealisasi Rp. 25.942.950,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 4 Dokumen

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : 64 Dokumen

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD : 64 Dokumen

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 64 Dokumen



5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD : 64 Dokumen

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 3 Dokumen

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 4.875.000,- atau 97,50%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Dokumen

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 119.793.231.220,- terealisasi Rp. 119.192.171.650,- atau 99,50%. Pada Kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 119.783.231.220,- terealisasi Rp. 119.182.221.650,- atau 99,50%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 1922 Orang/bulan

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : 12 Dokumen

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 3.720 Laporan

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;



Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 128.003.000,- terealisasi Rp. 116.453.000,- atau 90,98%. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, diantaranya :

1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 49.000.000,- terealisasi Rp. 37.500.000,- atau 76,54%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD : 1 Laporan

2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,- atau 98,91%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 12 Laporan

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 74.003.000,- terealisasi Rp. 74.003.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 4 Laporan

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 15.000.000,- atau 100%. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, diantaranya :

1) Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : 2 Dokumen

2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian : 12 Dokumen

3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai : 2 Dokumen

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 223.050.500,- terealisasi Rp. 221.410.500,- atau 99,26%. Pada Kegiatan ini terdapat 8 (delapan) sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.002.000,- terealisasi Rp. 5.002.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 4 Paket

2) Penyediaan Peralatan Kantor;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 118.200.000,- terealisasi Rp. 116.560.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 37.941.500,- terealisasi Rp. 37.941.500,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 5 Paket

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 1 Dokumen

6) Fasilitas Kunjungan Tamu;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu : 12 Laporan

7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 19.907.000,- terealisasi Rp. 19.907.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : 1 Dokumen

8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 19.907.000,- terealisasi Rp. 19.907.000,- atau 100%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan



1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 8.465.115.410,- terealisasi Rp. 8.034.245.746,- atau 94,91%. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 369.000.000,- terealisasi Rp. 354.727.710,- atau 96,13%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 12 Laporan

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,- atau 96,5%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Laporan

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,- atau 96,5%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Laporan

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 978.930.000,- terealisasi Rp. 968.967.009,- atau 98,98%. Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan, diantaranya :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 186.460.000,- terealisasi Rp. 180.046.726,- atau 96,6%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 6 Unit, dengan rincian :

a) Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan pemeliharaan Eselon II/b : 1 Unit

b) Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan pemeliharaan Eselon III/a : 1 Unit

c) Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak dan pemeliharaan Eselon III/b : 4 Unit

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 116.100.000,- terealisasi Rp. 116.040.033,- atau 99,9%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 2 Unit, dengan rincian sebagai berikut :



a) Belanja Bahan bakar Kendaraan dan pemeliharaan Micro Bus : 12 Bulan

b) Pemeliharaan kendaraan operasional Gudang Farmasi : 12 Bulan

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 26.820.000,- terealisasi Rp. 26.568.000,- atau 99,1%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 39 Unit

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 649.550.000,- terealisasi Rp. 646.312.250,- atau 99,5%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2 Unit (kantor Dinkes Gunung Butak dan Kantor Asem)

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.382.784.520,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.240.453.908.328,- atau 98,80%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 25.990.000.860,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.437.717.291,- atau 97,88%. Pada Kegiatan ini terdapat 9 (sembilan) sub kegiatan, diantaranya :

1) Pengembangan Puskesmas;

Alokasi Anggaran Pengembangan Puskesmas Sebesar Rp. 451.305.600,- terealisasi Rp. 447.600.175,- atau 99,18%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar : 4 Unit (Puskesmas Buniwangi, Puskesmas Ciracap, Puskesmas Cikakak dan Puskesmas Surade)

2) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

Alokasi Anggaran Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sebesar Rp. 850.401.400,- terealisasi Rp. 846.731.400,- atau 99,57%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar : 4 Unit (Pustu Buniwangi Kec Surade,

Pustu Desa Titisan Kec Sukalarang, Pustu Wangunreja Kec Nyalindung, Pustu Muaradua Kec Kadudampit)

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;

Alokasi Anggaran Pengembangan Puskesmas Sebesar Rp. 1.532.305.000,- terealisasi Rp. 1.525.556.500,- atau 99,56%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas : 8 Unit (PONED Puskesmas Ciracap, PONED Puskesmas Tegalbuleud, PONED Puskesmas Buniwangi, Gedung PKM Cicantayan, Rehab Puskesmas Sukalarang, PONED Puskesmas Sagaranten, PONED Puskesmas Kalibunder PONED Puskesmas Lengkong)

4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

Alokasi Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 2.376.872.560,- terealisasi Rp. 2.364.624.500,- atau 99,48%. Keluarannya adalah :

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya : 8 Unit (Rehab PUSTU Karajinan Girijaya, Pustu Bojonggaling Bojonggenteng, Pustu Citepus Palabuhanratu, Pustu Kadaleman Surade, Pustu Tangkil Cidahu, Pustu Cilangkap Lengkong, Pustu Cikujang Gunungguruh, Pustu Sirnamekar Bangbayang, Pustu Balekambang Kalibunder, Pustu Tanjungsari Jampang Tengah, Pustu Sumberjaya Tegalbuleud, Pustu Cicantayan, Pustu Warnasari Surade, Pustu Nagrak Jaya Curugkembar, Pustu Jampang Kulon, Pustu Kertaangsana Nyalindung, Pustu Girimukti Ciemas).

5) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Alokasi anggaran Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 714.020.000,- terealisasi Rp. 681.603.000,- atau 95,46%. Keluarannya adalah :

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan : 458 Unit (tersebar di 58 Puskesmas).

6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Alokasi anggaran Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 11.388.700.700,- terealisasi Rp. 10.896.151.700,- atau 95,68%. Keluarannya adalah :

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan : 641 Unit (tersebar di 58 Puskesmas)

7) Pengadaan Obat, Vaksin;

Alokasi anggaran Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp. 624.597.600,- terealisasi Rp. 624.597.600,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan : 1 Paket (tersebar di 58 Puskesmas)

8) Pengadaan Bahan Habis Pakai;

Alokasi anggaran Pengadaan Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 7.860.998.000,- terealisasi Rp. 7.860.352.416,- atau 99,99%. Keluarannya adalah :

Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan : 2 Paket (tersebar di 58 Puskesmas).

9) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Alokasi anggaran Pengadaan Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 190.800.000,- terealisasi Rp. 190.500.000,- atau 99,84%. Keluarannya adalah :

Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan : 8 Unit (Pemeliharaan Ambulance Puskesmas).

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 215.937.692.660,- terealisasi Rp. 213.652.672.989,- atau 98,84%.

Ada 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

Alokasi anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp. 1.117.800.000,- terealisasi Rp. 918.175.000,- atau 82,14%. Keluarannya adalah :
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar :
45.563 Orang

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

Alokasi anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp. 541.000.000,- realisasi Rp. 538.750.000,- atau 99,58%. Keluarannya adalah :
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar :
43.492 Orang

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

Alokasi anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp. 243.000.000,- realisasi Rp. 240.750.000,- Atau 99,07%. Keluarannya adalah :
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar :
42.995 Orang.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;



Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 178.400.000,- terealisasi Rp. 176.150.000,- atau 98,74%. Keluarannya adalah :

Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 200.096 Orang.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi Rp. 79.242.000,- atau 99,05%. Keluarannya adalah :

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 396.561 Orang.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 2.360.099.000,- terealisasi Rp. 2.359.791.750,- atau 99,99%. Keluarannya adalah :

Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 1.597.709 Orang.

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi Rp. 40.000.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 318.454 Orang.

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 30.000.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 172.455 Orang.

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 35.000.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar : 14.180 Orang

10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 28.578.000,- atau 95,26%. Keluarannya adalah :

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar : 3.572 Orang

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 262.135.200,- terealisasi Rp. 30.000.000,- atau 11,44%. Keluarannya adalah :



Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar : 7.682 Orang.

12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 1.580.000.000,- terealisasi Rp. 1.579.675.000,- atau 99,98%. Keluarannya adalah :

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar : 57.004 Orang.

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 29.089.595.500,- terealisasi Rp. 27.436.681.500,- atau 94,32%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat : 130 Dokumen.

14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 49.000.000,- terealisasi Rp. 47.750.000,- atau 97,45%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan : 2 Dokumen

15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 521.574.000,- terealisasi Rp. 463.522.000,- atau 88,87%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan : 5 Dokumen.

16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 235.832.000,- terealisasi Rp. 235.832.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan : 10 Dokumen

17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 219.204.000,- terealisasi Rp. 210.2040.000,- atau 95,89%. Keluarannya adalah :

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan : 700 Orang

18) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 750.000.000,- terealisasi Rp. 750.000.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus : 1 Dokumen

19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;



Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 1.085.717.500,- terealisasi Rp. 1.038.971.500,- atau 95,69%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular : 7 Dokumen

20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 176.552.335.460,- terealisasi Rp. 176.476.702.239,- atau 99,96%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat : 48 Dokumen

Jumlah Kepesertaan KIS PBI Daerah yang dibayarkan : 406.299 Orang

21) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 800.000.000,- terealisasi Rp. 799.923.000,- atau 99,99%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat : 8 Dokumen

22) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 137.000.000,- terealisasi Rp. 136.975.000,- atau 99,98%. Keluarannya adalah :

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria : 28 Orang

2.3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Sebesar Rp. 1.455.091.000,- terealisasi Rp. 1.363.518.048,- atau 93,71%. Ada 1 (satu) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Alokasi anggaran ini Sebesar Rp. 1.455.091.000,- terealisasi Rp. 1.363.518.048,- atau 93,71%. Keluarannya adalah :

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan : 58 Unit / Puskesmas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.713.919.272,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.694.861.182,- atau 93,43%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

3.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;



Alokasi Anggaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Sebesar Rp. 28.486.889.072,- terealisasi Rp. 27.036.953.180,- atau 94,91%. Ada 2 (dua) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya :

1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 28.014.518.072,- terealisasi Rp. 26.703.683.180,- atau 95,32%. Keluarannya adalah :

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) : 1.595 Orang

2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 472.371.000,- terealisasi Rp. 333.270.000,- atau 70,55%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan : 1 Dokumen

3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 2.227.030.200,- terealisasi Rp. 1.657.908.002,- atau 74,44%. Ada 1 (satu) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Alokasi anggaran Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini sebesar Rp. 2.227.030.200,- terealisasi Rp. 1.657.908.002,- atau 74,44%. Keluaran Sub Kegiatan ini adalah :

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya : 211 Orang

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Alokasi Anggaran Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sebesar Rp. 16.500.000,- terealisasi Rp. 16.500.000,- atau 100%.

Ada 1 (satu) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 16.500.000,- terealisasi Rp. 16.500.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) : 45 Dokumen Sarana

4.2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 17.000.000,- terealisasi Rp. 17.000.000,- atau 100%.

Ada 1 (satu) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;

Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- terealisasi Rp. 17.000.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga : 32 Dokumen

4.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

Alokasi Anggaran Kegiatan ini Sebesar Rp. 16.500.000,- terealisasi Rp. 16.500.000,- atau 100%.

Ada 1 (satu) Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya :

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan;

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini Sebesar Rp. 16.500.000,- terealisasi Rp. 16.500.000,- atau 100%. Keluarannya adalah :

Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga



Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan : 44 Sarana IRTP

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.238.939.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.161.741.500,- atau 96,55%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Kegiatan ini Sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.200.000,- atau 96,80%.

Adapun Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini Sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.200.000,- atau 96,80%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat : 1 Dokumen

5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Kegiatan ini Sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.375.000,- atau 97,50%.

Adapun Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:

1) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini Sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 24.375.000,- atau 97,50%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat : 3 Dokumen

5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Kegiatan ini Sebesar Rp. 2.188.939.000,- terealisasi Rp. 2.113.166.500,- atau 96,54%.

Adapun Sub Kegiatan dari kegiatan ini, diantaranya:



1) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini Sebesar Rp. 2.188.939.000,- terealisasi Rp. 2.113.166.500,- atau 96,54%. Keluarannya adalah :

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) : 7 Dokumen

Rincian Anggaran pelaksanaan program urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
5	6	7	8	9	10	11			
					406.044.965.422	399.964.576.865	98,50		
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	129.659.322.630	128.604.065.855	99,19		
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100					
	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100					
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100					
	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100					
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100					
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100					
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100					
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	266	266	55.992.500	55.817.950	99,69	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	25.992.500	25.942.950	100



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
5		6	7	8	9	10	11		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	64	64	5.000.000	5.000.000	100
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	64	64	5.000.000	5.000.000	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	64	64	5.000.000	5.000.000	100
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	64	64	5.000.000	5.000.000	100
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	5.000.000	5.000.000	100
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	5.000.000	4.875.000	97,50
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1.996	1.996	119.793.231.220	119.192.171.650	99,50
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.922	1.922	119.783.231.220	119.182.221.650	99,50
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	5.000.000	5.000.000	100
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	62	62	5.000.000	4.950.000	99,00
1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	128.003.000	116.453.000	90,98
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	49.000.000	37.500.000	76,53
	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	5.000.000	4.950.000	99,00
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	74.003.000	74.003.000	100
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	16	16	15.000.000	15.000.000	100



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	5.000.000	5.000.000	100
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	5.000.000	5.000.000	100
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	5.000.000	5.000.000	100
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	38	38	223.050.500	221.410.500	99,26
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	5.002.000	5.002.000	100
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	118.200.000	116.560.000	98,61
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	37.941.500	37.941.500	100
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	12.000.000	12.000.000	100
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	100
	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	10.000.000	10.000.000	100
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	19.907.000	19.907.000	100
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	100
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Laporan	25	25	8.465.115.410	8.034.245.746	94,91
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	369.000.000	354.727.710	96,13
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	50.000.000	49.500.000	99,00
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	8.046.115.410	7.630.018.036	94,83
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	15	15	978.930.000	968.967.009	98,98
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	6	6	186.460.000	180.046.726	96,56



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
		Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	116.100.000	116.040.033	99,95
	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	26.820.000	26.568.000	99,06
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	649.550.000	646.312.250	99,50
			Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan						
			Pengaspalan lahan Parkir Kantor Dinas Kesehatan						
02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	64	72,35	243.382.784.520	240.453.908.328	98,80
			Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	17	25,22			
			Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100	100			
2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Lanjutan yang disediakan	Jenis	21	21	25.990.000.860	25.437.717.291	97,88
	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	4	4	451.305.600	447.600.175	99,18
			Puskesmas Buniwangi	Unit	1	1			
			Puskesmas Ciracap	Unit	1	1			
			Puskesmas Cikakak	Unit	1	1			
			Puskesmas Surade	Unit	1	1			
	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	4	4	850.401.400	846.731.400	99,57
			Pustu Buniwangi Kec Surade	Unit	1	1			
			Pustu Desa Titisan Kec Sukalarang	Unit	1	1			
			Pustu Wangunreja Kec Nyalindung	Unit	1	1			
			Pustu Muaradua Kec Kadudampit	Unit	1	1			
	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	Unit	8	8	1.532.305.000	1.525.556.500	99,56



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
			dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas						
			PONED Puskesmas Ciracap	Unit	1				
			PONED Puskesmas Tegalbuleud	Unit	1				
			PONED Puskesmas Buniwangi	Unit	1				
			Gedung PKM Cicantayan	Unit	1				
			Rehab Puskesmas Sukalarang	Unit	1				
			Rehab Puskesmas Sagaranten	Unit	1				
			PONED Puskesmas Kalibunder	Unit	1				
			PONED Puskesmas Lengkong	Unit	1				
	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	18	18	2.376.872.560	2.364.624.500	99,48
			Rehabilitasi Pustu Karajinan Puskesmas Girijaya	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Bojongsaling Puskesmas Bojongsenteng	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Citepus Puskesmas Palabuhanratu	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Kadaleman Puskesmas Surade	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Kertajaya Puskesmas Simpenan	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Tangkil Puskesmas Cidahu	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Desa Cilangkap Puskesmas Lengkong	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Cikujang Puskesmas Gunungguruh	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Sirnamekar Puskesmas Bangbayang	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Balekambang Puskesmas Kalibunder	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Tanjungsari Puskesmas Jampang Tengah	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Sumberjaya Puskesmas Tegalbuleud	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Cantayan Puskesmas Cicantayan	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Desa Warnasari Puskesmas Surade	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Nagrakjaya Puskesmas Curugkembar	Unit	1				



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
			Rehabilitasi Pustu Jampangkulon Puskesmas Jampangkulon	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Kertaangsana Nyalindung	Unit	1				
			Rehabilitasi Pustu Desa Girimukti Puskesmas Ciemas	Unit	1				
	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	458	458	714.020.000	681.603.000	95,46
			Lokasi 58 Puskesmas						
	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	641	641	11.388.700.700	10.896.151.700	95,68
	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1	624.597.600	624.597.600	100
	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	2	2	7.860.998.000	7.860.352.416	99,99
	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	8	8	190.800.000	190.500.000	99,84
			Pemeliharaan Ambulance Puskesmas						
2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan	Jenis	38	30	215.937.692.660	213.652.672.989	98,94
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	45.563	47.730	1.117.800.000	918.175.000	82,14
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43.492	41.867	541.000.000	538.750.000	99,58
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	42.995	42.995	243.000.000	240.750.000	99,07
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200.096	193.376	178.400.000	176.150.000	98,74
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	396.561	390.681	80.000.000	79.242.000	99,05
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1.597.709	1.101.566	2.360.099.000	2.359.791.750	99,99
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	318.454	306.116	40.000.000	40.000.000	100



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	172.455	163.475	30.000.000	30.000.000	100
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.180	14.180	35.000.000	35.000.000	100
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	3.572	3.572	30.000.000	28.578.000	95,26
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7.682	7.682	262.135.200	30.000.000	11,44
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	57.004	46.432	1.580.000.000	1.579.675.000	99,98
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	130	130	29.089.595.500	27.436.681.500	94,32
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	2	49.000.000	47.750.000	97,45
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	5	521.574.000	463.522.000	88,87
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	10	10	235.832.000	235.832.000	100
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	700	700	219.204.000	210.204.000	95,89
	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	1	750.000.000	750.000.000	100
	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	7	7	1.085.717.500	1.038.971.500	95,69
	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	48	48	176.552.335.460	176.476.702.239	99,96
			Jumlah Kepesertaan KIS PBI Daerah yang dibayarkan	Orang	406.299	406.299			
	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	8	8	800.000.000	799.923.000	99,99
	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	28	28	137.000.000	136.975.000	99,98
	2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin RS Kelas C,D dan FKTP	Berkas	3	3	1.455.091.000	1.363.518.048	93,71
	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	Unit	58	58	1.455.091.000	1.363.518.048	93,71



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
			(INM) Pelayanan kesehatan						
03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	39	43,0	30.713.919.272	28.694.861.182	93,43
3.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>		Penyusunan Data Kebutuhan SDM untuk Pemenuhan Kebutuhan SDM (9 Profesi Nakes) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	767	767	28.486.889.072	27.036.953.180	94,91
	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1595	1591	28.014.518.072	26.703.683.180	95,32
	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	472.371.000	333.270.000	70,55
3.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Uji Kompetensi Untuk Perawat dan Perawat Gigi	Orang	60	60	2.227.030.200	1.657.908.002	74,44
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	211	211	2.227.030.200	1.657.908.002	74,44
04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100	100	50.000.000	50.000.000	100
4.2.01	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>		Pemberian rekomendasi izin sarana pelayanan kefarmasin	Sarana	45	45	16.500.000	16.500.000	100
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	45	45	16.500.000	16.500.000	100
4.2.02	<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>		Pemberian rekomendasi sertifikat produksi PKRT	Rekomendasi	1	1	17.000.000	17.000.000	100
	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	32	32	17.000.000	17.000.000	100



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5		6	7	8	9	10	11	
4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	terbina dan terawasanya sarana pangan dan pangan produk olahan yang sudah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	Sarana	25	25	16.500.000	16.500.000	100
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	IRTP	44	44	16.500.000	16.500.000	100
05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	34	31,0	2.238.939.000	2.161.741.500	96,55
5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	116	116	25.000.000	24.200.000	96,80
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	25.000.000	24.200.000	96,80
5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Promkes	Kali	3	3	25.000.000	24.375.000	97,50
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	3	3	25.000.000	24.375.000	97,50
5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Desa yang mendukung UKBM melalui ADD	Desa	231	381	2.188.939.000	2.113.166.500	96,54
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	7	7	2.188.939.000	2.113.166.500	96,54
JUMLAH TOTAL						406.044.965.422	399.964.576.865	98,50

B. UPTD LABORATORIUM DAN KLINIK KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Daerah (LABKESDA) adalah Rp. 1.820.416.318,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.651.520.610,- atau 90,72%. Dengan rincian sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5	6	7	8	9	10	11	
					1.820.416.318	1.651.520.610	90,72
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian	%	100	100	1.820.416.318	1.651.520.610	90,72



		Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan						
1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	62	62	1.820.416.318	1.651.520.610	90,72
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit Kerja	1	1	1.820.416.318	1.651.520.610	90,72
JUMLAH TOTAL						1.820.416.318	1.651.520.610	90,72

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.820.416.318,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.520.610,- atau 90,72%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.1 Peningkatan Pelayanan BLUD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 1.820.416.318,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.520.610,- atau 90,72%. Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, diantaranya :

1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 1.820.416.318,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.651.520.610,- atau 90,72%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan : 1 Unit Kerja

C. UPTD GUDANG FARMASI

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Gudang Farmasi adalah Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.907.500,- atau 99,91%. Dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
5	6	7	8	9	10	11		
					100.000.000	99.907.500	99,91	
02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	64	72,35	100.000.000	99.907.500	99,91	
1.2.10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Lanjutan yang disediakan	Jenis	21	21	100.000.000	99.907.500	99,91



	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	600	600	100.000.000	99.907.500	99,91
			JUMLAH TOTAL				100.000.000	99.907.500	99,91

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.907.500,- atau 99,91%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.907.500,- atau 99,91%. Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan, diantaranya :

1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya;

Alokasi Anggaran ini Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.907.500,- atau 99,91%%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya : 600 Paket

D. UPTD PUSKESMAS

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh UPTD Puskesmas (58 Puskesmas) di Kabupaten Sukabumi ada 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan () Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 204.862.613.632,- realisasi Rp. 184.010.122.573,- atau 89,82%. Dengan Rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5	6	7	8	9	10	11	
					204.862.613.632	184.010.122.573	89,82
<i>01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Tepat Waktu yang sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	141.716.444.632	131.585.459.407	92,85



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5		6	7	8	9	10	11	
1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	58	58	141.716.444.632	131.585.459.407	92,85
	2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit Kerja	58	58	141.716.444.632	131.585.459.407	92,85
02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	17	25,22	60.749.120.800	50.319.993.166	82,83
2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan	Jenis	38	30	60.749.120.800	50.319.993.166	82,83
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	45.563	47.730	5.467.747.000	5.195.266.000	95,02
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	42.995	42.995	4.350.000	0	0
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	200.096	193.376	700.123.500	201.805.000	28,82
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	396.561	390.681	14.100.000	13.560.000	96,17
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.597.709	1.101.566	2.207.510.000	1.758.315.000	79,65
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	318.454	306.116	816.025.000	759.290.000	93,05
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	3.572	3.572	342.240.000	272.125.000	79,51
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	7.682	7.682	702.600.000	624.025.715	88,82
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	58	58	237.060.000	60.753.000	25,63
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	58	58	26.350.555.250	21.742.855.500	82,51
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	58	58	246.890.000	214.740.000	86,98



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
5		6	7	8	9	10	11		
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	58	58	563.340.000	515.330.000	91,48
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	58	58	2.332.726.600	1.959.825.500	84,01
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Orang	58	58	864.520.000	514.290.000	59,49
	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	3.560	3.560	543.960.000	417.540.000	76,76
	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	58	58	6.945.127.000	6.050.849.579	87,12
	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	48	48	116.408.500	28.306.000	24,32
	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	58	58	11.946.577.950	9.688.796.872	81,10
	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	58	58	130.230.000	102.630.000	78,81
	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	58	58	3.360.000	3.360.000	100
	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	7.682	7.682	212.110.000	196.330.000	92,56
	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	28	28	1.560.000	0	0
05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	34	31,0	2.397.048.200	2.104.670.000	87,80	
5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Desa yang mendukung UKBM melalui ADD	Desa	231	381	2.397.048.200	2.104.670.000	87,80
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	58	58	2.397.048.200	2.104.670.000	87,80
JUMLAH TOTAL						204.862.613.632	184.010.122.573	89,82	

**E. RSUD SEKARWANGI**

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Sekarwangi adalah Rp. 172.635.344.185,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.896.111.159,- atau 95,5%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	12
							172.635.344.185	164.896.111.159	95,5
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							172.605.344.185	164.896.111.159	95,5
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500.162.000	489.565.500	98
	01	Pengadaan Aset Tak Berwujud	DED Gedung Manajemen dan Pengelola RSUD Sekarwangi	kegiatan	1	1	500.162.000	489.565.500	98
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.838.000	231.410.791	81,24
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional jabatan	Unit	9	9	284.838.000	231.410.791	81,2
4	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	171.820.344.185	164.175.134.868	96
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Pegawai BLUD	bulan	12	12	171.820.344.185	164.175.134.868	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		bulan	12	12				
	Belanja Modal BLUD		bulan	12	12	#DIV/0!			
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							30.000.000	0	0
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000	0	0
	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kalibrasi Alat Laboratorium/Instrumen (Instrumen, Glassware, Oven, Neraca, dan lainnya)	unit	10	0	30.000.000	0	0



F. RSUD PALABUHANRATU

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Palabuhanratu adalah Rp. 102.211.205.279,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.600.228.483,- atau 95,58%. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
5	6	7	8	9	10	11	
					102.727.634.583	98.189.591.243	95,58
01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					102.727.634.583	98.189.591.243	95,58
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000	-	-
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	5.000.000	-	
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	1	1	5.000.000	-	
2 Peningkatan Pelayanan BLUD					102.717.634.583	98.189.591.243	95,59
1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	102.717.634.583	98.189.591.243	95,59

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu :

1. Program dan Kegiatan

BLUD RSUD Palabuhanratu melaksanakan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dalam melaksanakan urusan kesehatan melalui Kebijakan Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat. Program dan kegiatan dalam melaksanakan urusan kesehatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Ada 2 (dua) Sub Kegiatan, diantaranya :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% . Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 0 Dokumen

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0%. Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 0 Laporan

2. Peningkatan Pelayanan BLUD

Ada 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu



1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 102.717.634.583,- teralisasi Rp. 98.189.591.243,- atau 95,59%, output : Keluaran dari sub kegiatan tersebut adalah :

Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan :
1 Unit Kerja

2. Capaian kinerja urusan kesehatan dalam Tahun 2023 sebagai berikut :

1. BOR (Bed Occupancy Ratio) SESUAI NILAI STANDAR NASIONAL (60-85%)

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
BOR (Bed Occupancy Ratio) nilai standar nasional (60-85)	%	67,84	70,33	103,67

Sumber Data : Rekam Medik

2. ALOS (Average Lange of Stay) NILAI STANDAR NASIONAL(6-9 hari)

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
ALOS (Average Lange of Stay) nilai standar nasional (6-9 hari)	Hari	3,66	3,84	104,91

Sumber Data : Rekam Medik

3. TOI (Turn Over Interval) SESUAI NILAI STANDAR (1-3 hari)

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
TOI (Turn Over Interval) nilai standar nasional (1-3 hari)	Hari	1,28	1,17	91,40

Sumber Data : Rekam Medik

4. MENURUNKAN ANGKA NDR (Net Death Rate) NILAI STD NASIONAL <25‰

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Angka Net Death Rate (NDR) Standar Nasional <25‰	‰	10,69	10,72	100,28

Sumber data : Rekam Medik



5. MENURUNKAN ANGKA GDR (Gross Death Rate)NILAI STANDAR <45‰

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Angka Gross Death Rate (GDR) standar nasional <45‰	‰	20,81	19,96	95,91

Sumber data : Rekam Medik

6. Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (Bed Turn Over / BTO) nilai standar 40-50 kali/Tahun

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (Bed Turn Over/BTO), nilai standar 40-50 Kali	Kali	96,46	92,92	96,33

Sumber Data : Rekam Medik

7. KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Kasus	74.242	79.677	107,32

Sumber Data : Rekam Medik

8. JUMLAH KUNJUNGAN INSTALASI GAWAT DARURAT

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Jumlah Kunjungan Pasien IGD	Kasus	21.352	24.935	116,78

Sumber Data : Rekam Medik

9. REKAPITULASI NILAI HASIL IKM :62,51 -81,25

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
Kepuasan Customer Baik (nilai baik 62.51-81.25)	%	82,00	85,01	103,67

Sumber Data : Diklat

Berdasarkan data diatas hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 mencapai nilai 85,01 dari target nilai 82,00 artinya sudah melampaui target/tercapai, termasuk **kategori Sangat Baik** (standar 62,51 – 81).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan masih perlu adanya pengembangan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien baik dirawat jalan, rawat inap, dan IGD.
- Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dokter spesialis dan sub spesialis masih perlu adanya penambahan.
- Belum tercapainya upaya peningkatan kompetensi tenaga unit layanan

Solusi :

- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan terutama bangunan IGD dan sarana penunjang lainnya.
- Perlu adanya rekrutmen dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan formal atau pengajuan melalui Program PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari Kemenkes RI
- Meningkatkan frekwensi diklat fungsional pada unit layanan rumah sakit pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi di rumah sakit

Kesimpulan

Kinerja pelayanan melalui indikator pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO, GDR, NDR) pada umumnya sudah memenuhi target sesuai yang direncanakan Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa pencapaian kinerja BOR pada Tahun 2023 target BOR RSUD Palabuhanratu sudah tercapai dengan yang ditargetkan/direncanakan (67,84%) yaitu sebesar 70,33% dengan capaian tingkat realisasi sebesar 103,67% dari target yang direncanakan terlihat sudah ada peningkatan dibanding capaian BOR pada tahun 2022 sebesar 67,84%. Untuk memperbaiki kinerja tersebut agar masuk ke daerah efisien perlu adanya evaluasi dan analisa tentang keseimbangan penggunaan tempat tidur antar ruangan. Untuk mencapai index kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survai IKM Tahun 2023, mencapai nilai 85,01% dari target nilai 82,00% mencapai target 103,67 %, menggambarkan bahwa masyarakat cenderung puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit palabuhanratu. Pencapaian IKM 2023 tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil IKM tahun 2022. Nilai IKM tahun 2023 sebesar 85,01% masuk kedalam kategori **SANGAT MEMUASKAN** (standar 62,51-81).

**G. RSUD SAGARANTEN**

Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang dikelola oleh RSUD Sagaranten adalah Rp. 12.558.744.443,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.329.738.761,- atau 98,2%. Dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
5	6	7	8	9	10	11			
						12.558.744.443	12.329.738.761	98,2	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						7.042.678.943	7.015.407.424	99,6	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.000.000	240.670.900	98	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.000.000	5.000.000	100
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	23	23	220.000.000	215.673.900	98,0
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10.000.000	10.000.000	100
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	10.000.000	9.997.000	100
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					296.934.500	286.840.700	96,6	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	16	296.934.500	286.840.700	96,6
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					87.000.000	81.700.000	93,9	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	87.000.000	81.700.000	93,9
	Peningkatan Pelayanan BLUD					6.413.744.443	6.406.195.824	99,9	
		Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	6.413.744.443	6.406.195.824	99,9
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						5.516.065.500	5.314.331.337	96,34	
2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Lanjutan yang disediakan			5.516.065.500	5.314.331.337	96,34	



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5			6	7	8	9	10	11	
06	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	3.095.266.200	3.056.300.000	98,7
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	1	44.000.000	43.340.727	98,5
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jenis	27	26	1.976.501.500	1.839.733.610	93,1
16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	25	24	299.999.200	274.995.800	91,7
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	14	14	100.298.600	99.961.200	99,7

1. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Capaian Program

Capaian program RSUD Sagaranten tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET KINERJA	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Bed Occupancy Ratio (BOR) nilai standar 60-85%	%	72	64,62	90
		Angka Average Lange Of Stay (ALOS) nilai standar 3-5 hari	hari	5	2	40
		Angka Turn Over Interval (TOI) nilai standar 1-3 hari	hari	2	2	100
		Angka Net Death Rate (NDR) nilai standar <25 ‰	%	2	2	100
		Angka Gross Death Rate (GDR) nilai standar < 45 ‰	%	4	7	175
		Frekuensi pemakaian tempat tidur (Bed Turn Over /BTO nilai standar 40-50 kali)	kali	45	87	193
		Angka kunjungan pasien rawat jalan	kasus	4675	6061	130
		Angka kunjungan pasien IGD	kasus	5876	5040	86
	Kepuasan konsumen	%	80	80	100	



Penjelasan atas capaian kinerja sasaran :

- **BOR**

Bed Occupancy Rate (BOR) dihitung dengan cara membandingkan jumlah tempat tidur yang dipakai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia pada satuan waktu tertentu. Semakin tinggi nilai BOR semakin tinggi pula tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Namun apabila hunian tempat tidur terlalu tinggi, maka semakin banyak pasien yang dilayani, dan semakin berat pula beban kerja pada petugas. Akibatnya bisa menurun terhadap kepuasan pasien dan risiko infeksi nosokomial meningkat. Disisi lain semakin rendah BOR semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk perawatan pasien. Akibatnya berdampak pada pendapatan rumah sakit yang dibutuhkan dalam operasional penyelenggaraan rumah sakit yang terstandar.

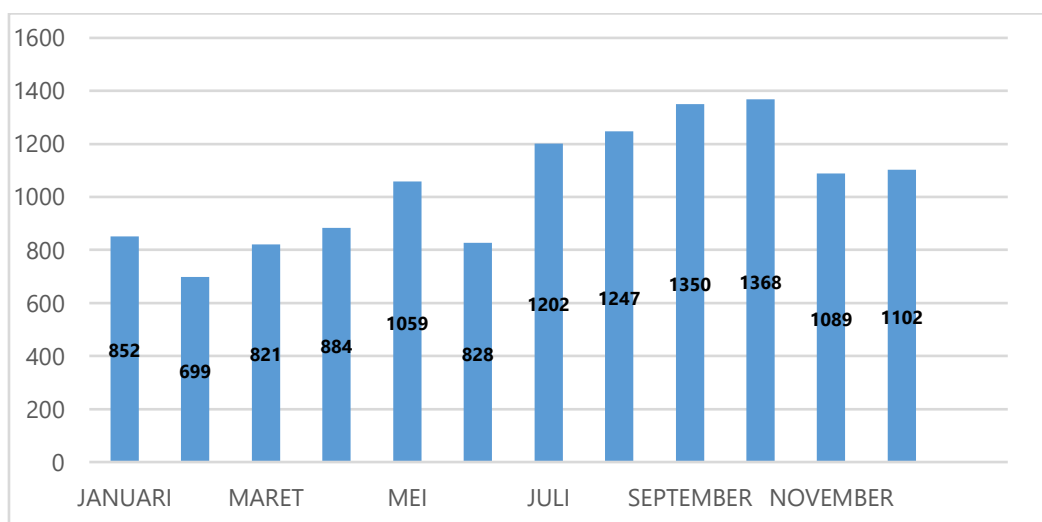
Departemen Kesehatan menetapkan bahwa standar BOR rumah sakit adalah antara 60 – 85%. Sesuai dengan Rencana Strategi RSUD Sagaranten, pada tahun 2023 ditetapkan target BOR sebesar 72%.

Capaian BOR RSUD Sagaranten untuk tahun 2023 sebesar 64,62%. Capaian BOR sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan rawat inap, jumlah hari perawatan dan jumlah ketersediaan tempat tidur.

Untuk mendapatkan nilai BOR rumus yang digunakan adalah :

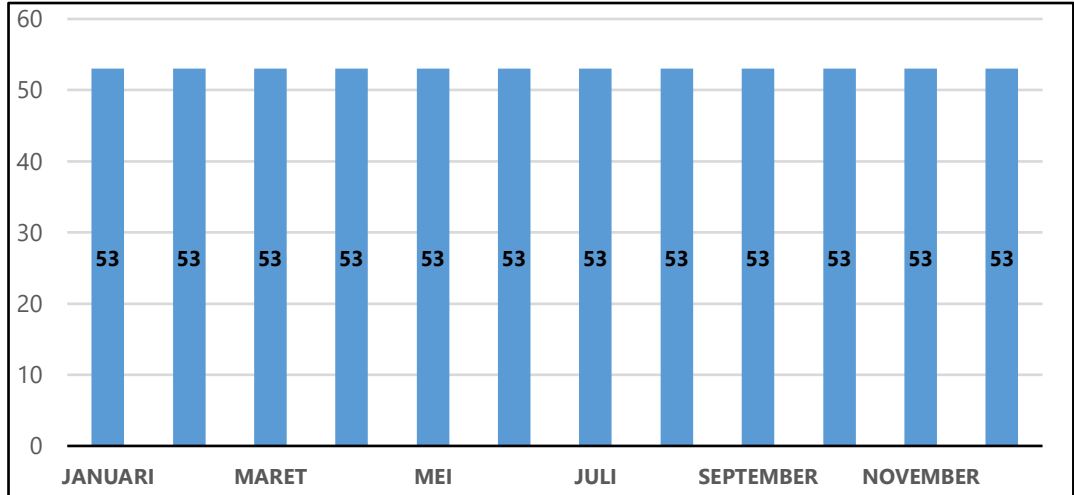
$$\text{BOR} = (\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit} / (\text{jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100\%.$$

LAMA HARI PERAWATAN PER BULAN TAHUN 2023

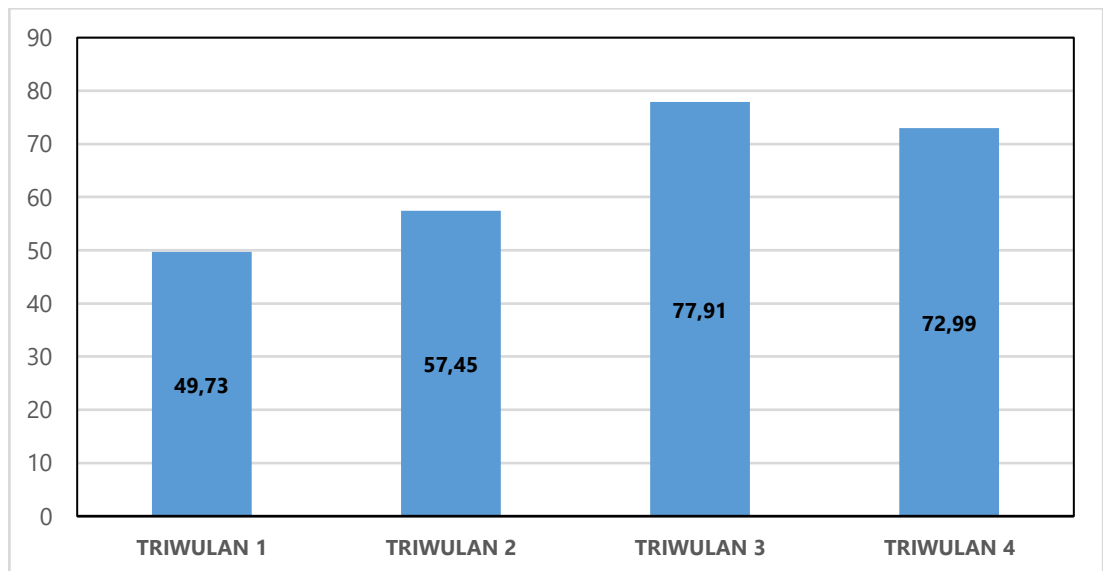




JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP YANG TERSEDIA TAHUN 2023



CAPAIAN BOR PER TRIWULAN TAHUN 2023



- **ALOS**

Salah satu indikator rawat inap untuk menilai efisiensi pelayanan rawat inap adalah Average Lange Of Stay (ALOS) yang merupakan rasio yang mengukur jangka waktu atau periode berapa lama rata - rata pasien dirawat. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan.

Semakin lama ALOS menunjukkan adanya pelayanan rumah sakit yang semakin menurun atau terjadi in-efisiensi dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu menimbulkan rasa bosan pada pasien, ketidaknyamanan akan tindakan yang membosankan pasien serta meningkatkan risiko infeksi.

Dari segi ekonomis, semakin lama pasien dirawat semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pasien dan diterima rumah sakit. Sebaliknya semakin sedikit ALOS juga menimbulkan ketidak telitian dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan kata lain terjadi pula penurunan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu



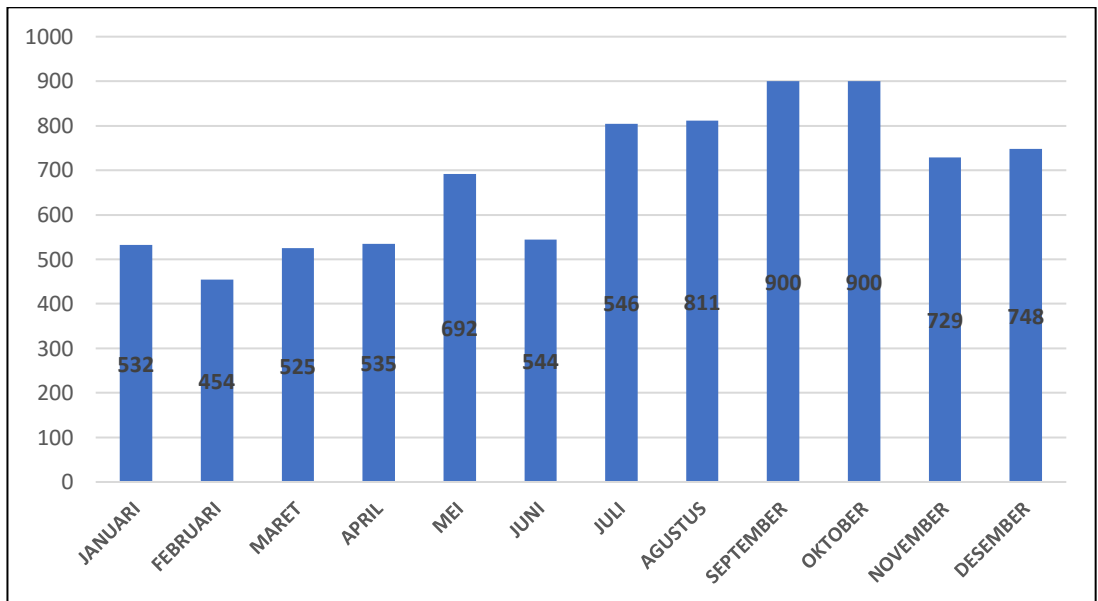
dalam menentukan ALOS yang ideal harus mempertimbangkan keseimbangan antara sudut pandang medis dan ekonomis.

Angka ideal ALOS adalah antara 3 – 5 hari. Tahun 2023 RSUD menetapkan target ALOS 5 hari dengan capaian pada tahun 2023 selama 5 hari (100%). Capaian tersebut masih kurang dalam standar yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa RSUD Sagaranten kurang efisien artinya rata-rata 2 hari pasien pulang dalam keadaan sembuh/atas permintaan sendiri.

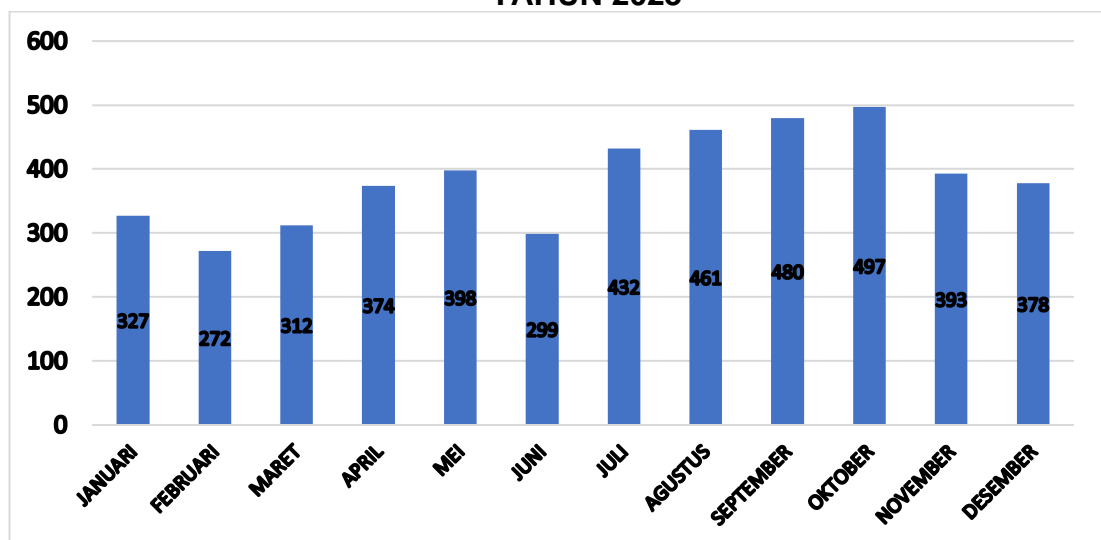
Rumus untuk perhitungan data ALOS adalah:

$ALOS = \text{Jumlah lama di rawat} / \text{jumlah pasien keluar pasien (hidup + meninggal)}$

DATA JUMLAH LAMA DIRAWAT DI RSUD Sagaranten PER BULAN TAHUN 2023

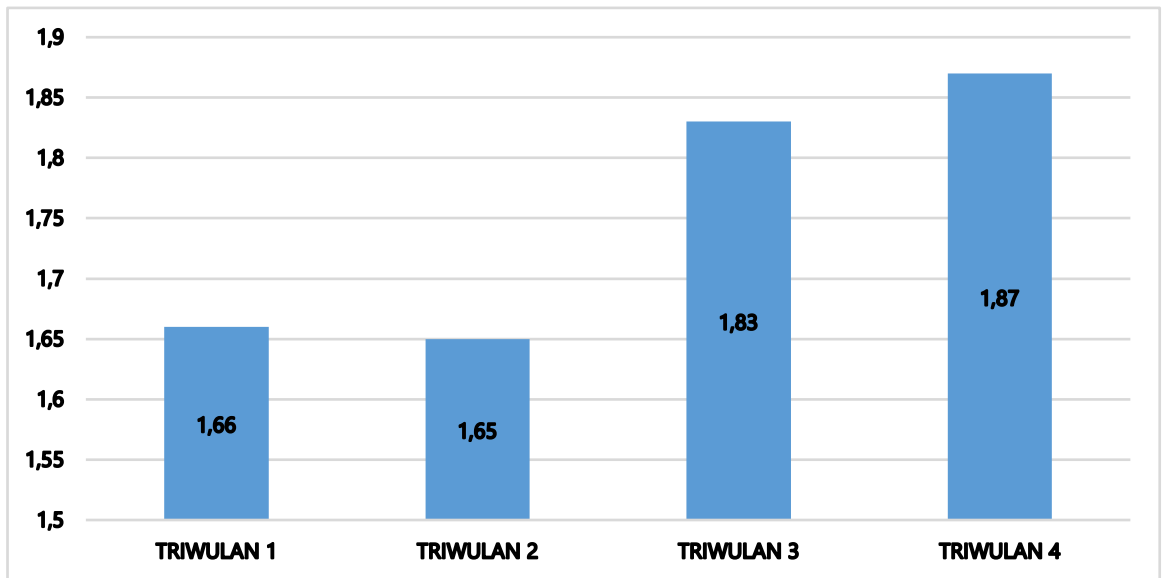


JUMLAH PASIEN KELUAR (HIDUP DAN MATI) PER BULAN TAHUN 2023





CAPAIAN ALOS PER TRIWULAN TAHUN 2023

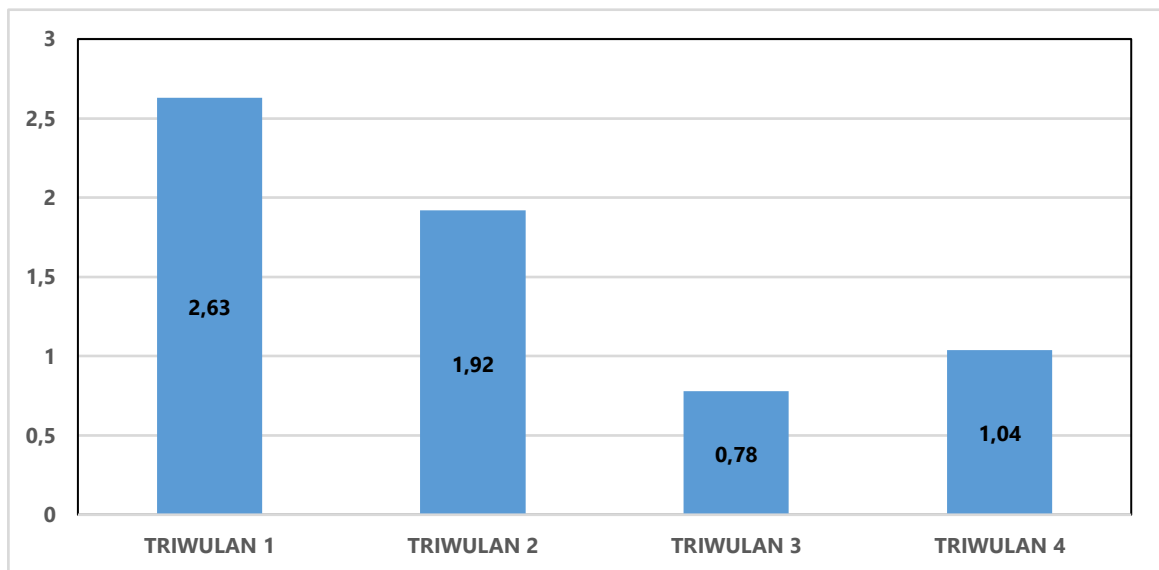


- **TOI**

Turn Over Interval (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga menggambarkan tingkat efisiensi tempat tidur. Target TOI yang ditetapkan RSUD Sagaranten untuk tahun 2023 selama 2 hari (100%). Capaian TOI tahun 2023 yaitu 2 hari. Capaian ini sudah memenuhi standar DEPKES, Capaian indikator TOI pada tahun 2023 sudah memenuhi Standar ideal TOI. Dimana nilai idealnya adalah 1 – 3 hari.

Rumus TOI = ((Jumlah tempat tidur x Periode)- Hari perawatan)/jumlah pasien keluar (Hidup + mati))

DATA CAPAIAN TOI PER TRIWULAN TAHUN 2023



- **NDR dan GDR**

Angka kematian adalah Indikator yang digunakan sebagai indikator hasil kinerja dari proses layanan. Kematian yang terjadi dalam 48 jam pertama pasien dirawat diindikasikan karena faktor kegawatan yang dialami oleh pasien semenjak masuk ke rumah sakit dalam artian kondisi pasien lebih menentukan penyebab kematian. Sedangkan kematian pasien setelah 48 jam perawatan maka perlu dilakukan kajian baik terhadap perjalanan penyakit pasien yang bersangkutan, catatan medik, serta ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana. Dua variabel yang digunakan dalam menilai angka kematian di rumah sakit, yaitu Net Death Rate (NDR) dan Gross Death Rate (GDR). GDR adalah angka kematian kasar. yaitu jumlah kematian untuk tiap tiap 1000 pasien keluar baik hidup maupun mati. Sedangkan NDR adalah angka kematian yang terjadi lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap tiap 1000 pasien keluar baik hidup maupun mati. Standar ideal yang ditetapkan kemenkes RI (2011) untuk masing-masing indikator yaitu Nilai NDR yang masih dianggap ditolelir adalah kurang dari 25‰ atau 2,5 % dan nilai GDR yang dianggap ditolelir adalah kurang dari 45‰ atau 4.5%. Tahun 2023 RSUD Sagaranten menetapkan target NDR 20‰ atau 2% dan GDR 40‰ atau 4%. Capaian yang diperoleh pada tahun 2023, untuk NDR 20‰ atau 2% dan GDR 70‰ atau 7% Capaian NDR masih dalam standar Kementerian Kesehatan RI dan GDR di RSUD Sagaranten belum memenuhi target yang ditetapkan dan belum termasuk dalam kategori standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan.

RUMUS NDR :

$$\text{NDR} = \left(\frac{\text{Jumlah Pasien Meninggal} > 48 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (hidup + mati)}} \right) \times 1000\%$$

JUMLAH PASIEN MENINGGAL > 48 JAM DI RSUD SAGARANTEN PER

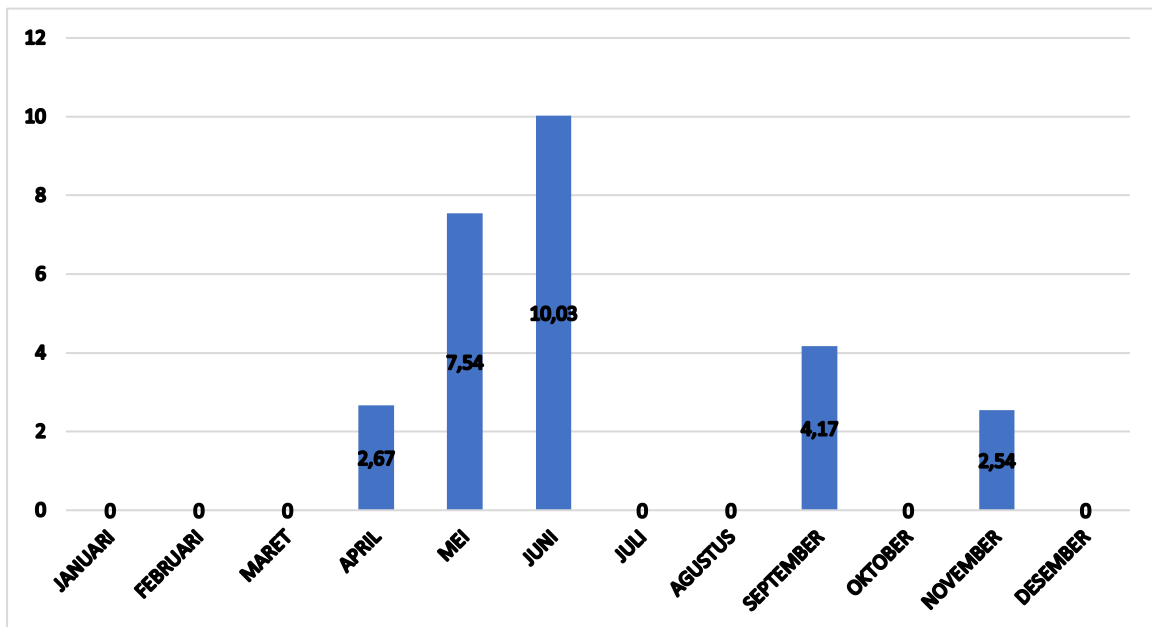
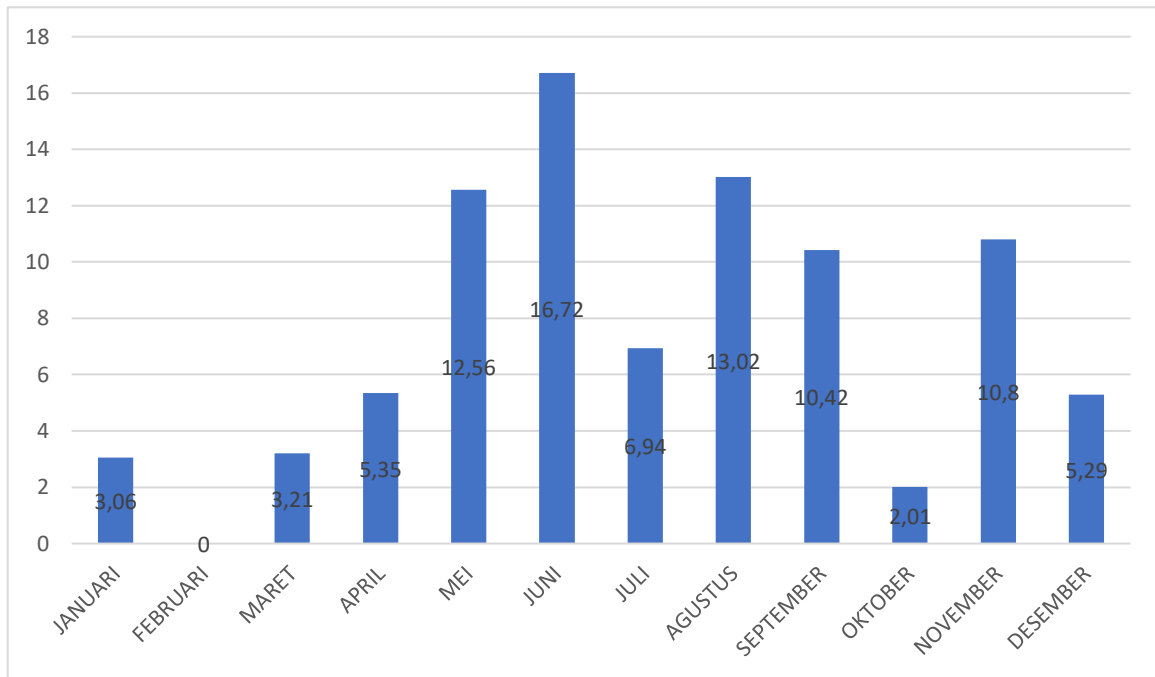


BULAN TAHUN 2023

RUMUS GDR :

$$\text{GDR} = (\text{Jumlah Pasien Mati seluruhnya} / \text{Jumlah Pasien Keluar (hidup + mati)}) \times 1000\%$$

JUMLAH PASIEN MENINGGAL SELURUHNYA DI RSUD SAGARANTEN PER BULAN TAHUN 2023





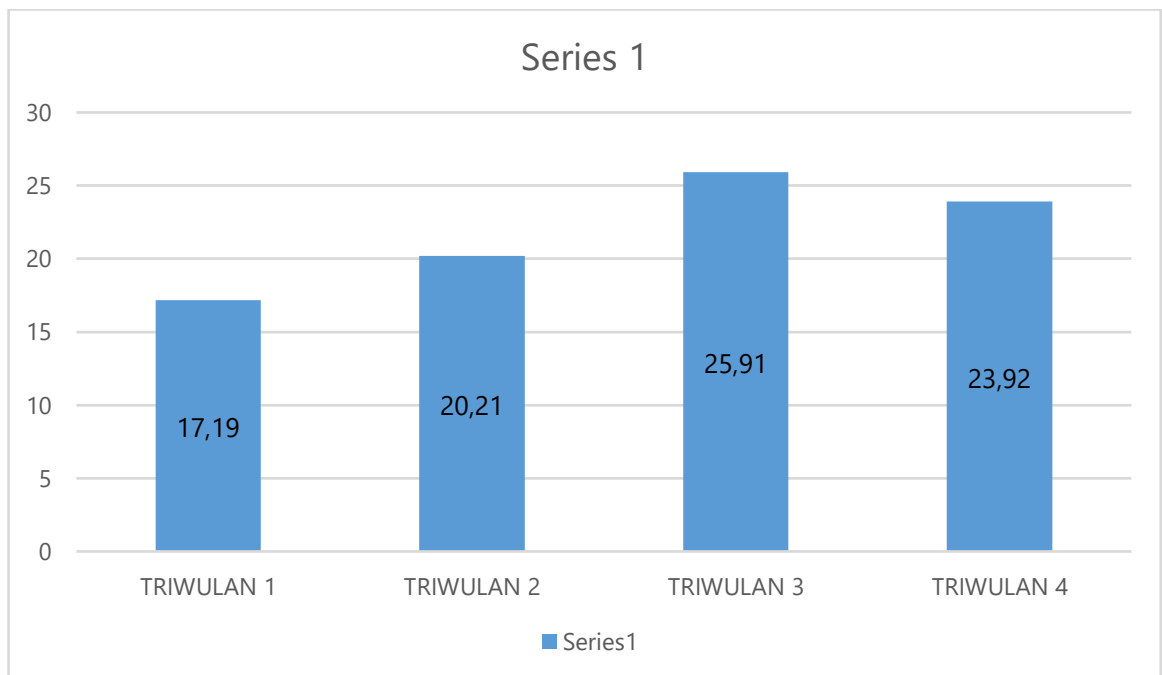
- **BTO**

Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, menggambarkan berapa kali tempat tidur dipakai oleh pasien dalam satuan waktu tertentu, periode biasanya dihitung dalam 1 tahun. Nilai standar BTO adalah 40 – 50 kali. Realisasi frekuensi pemakaian tempat tidur di RSUD Sagaranten tahun 2023 sebanyak 36 kali dalam 1 tahun atau 80% dari target yang ditetapkan.

Rumus BTO :

$BTO = ((\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}) + \text{Jumlah meninggal}) / \text{jumlah tempat tidur}$

CAPAIAN BTO PER BULAN TAHUN 2023



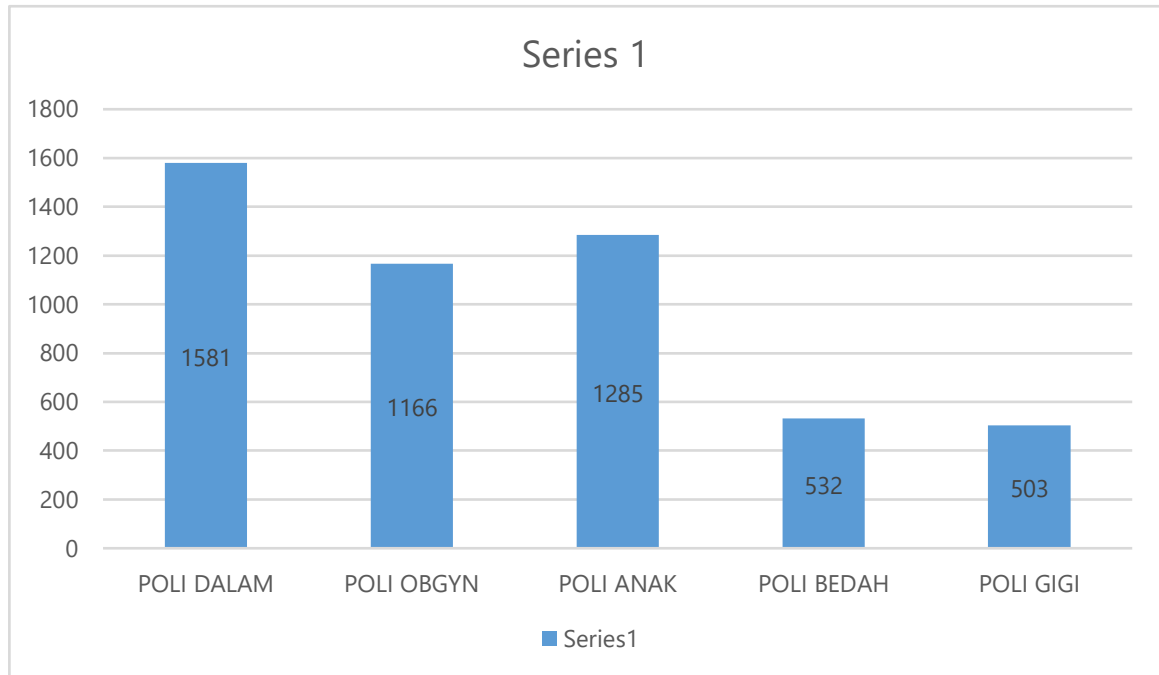
- **Angka Kunjungan Pasien Rawat Jalan**

Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan berobat jalan. RSUD Sagaranten sampai saat ini memiliki 5 jenis pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis di rawat jalan. Kenaikan kelas rumah sakit dengan bertambahnya dokter spesialis dan dokter sub spesialis sebagai bukti upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di RSUD Sagaranten.

Kunjungan pasien rawat jalan tahun 2023 sebanyak 3989. dan untuk prosentase capaian kinerja pada indikator kunjungan pasien rawat jalan 85%.

Dibawah ini disampaikan data kunjungan rawat jalan tahun 2023, sebagai berikut :

KUNJUNGAN RAWAT JALAN PER KLINIK TAHUN 2023

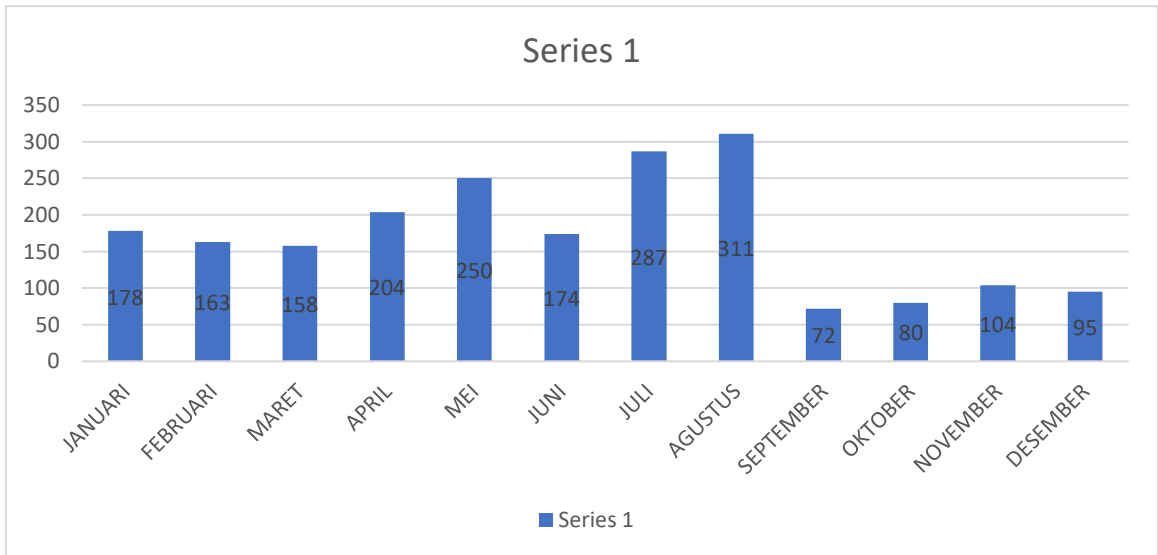


- **Angka Kunjungan Pasien IGD**

Instalasi Gawat darurat (IGD) adalah salah satu bagian rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain IGD adalah layanan yang disediakan selama 24 jam untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat yang cepat. Pasien yang dapat dilayani di IGD meliputi pasien gawat darurat, darurat tidak gawat, dan tidak darurat karena penyakit tertentu. Seperti kasus kecelakaan yang menimbulkan cedera fisik, mental, sosial, gangguan susunan saraf pusta, gangguan sistem cardiovacular, trauma fisik, keracunan, infeksi, kejadian sehari hari, musibah masal dan bencana. Kunjungan IGD RSUD Sagaranten tahun 2023 mencapai 3757 kasus (64%).



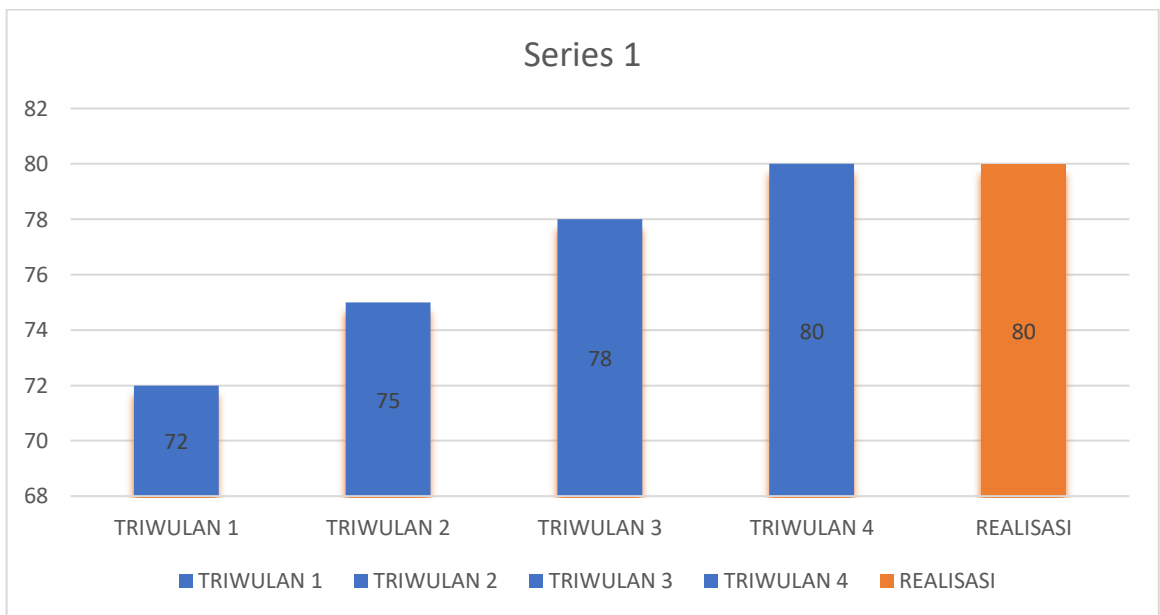
DATA KUNJUNGAN IGD TAHUN 2023 BULAN JANUARI S.D.DESEMBER



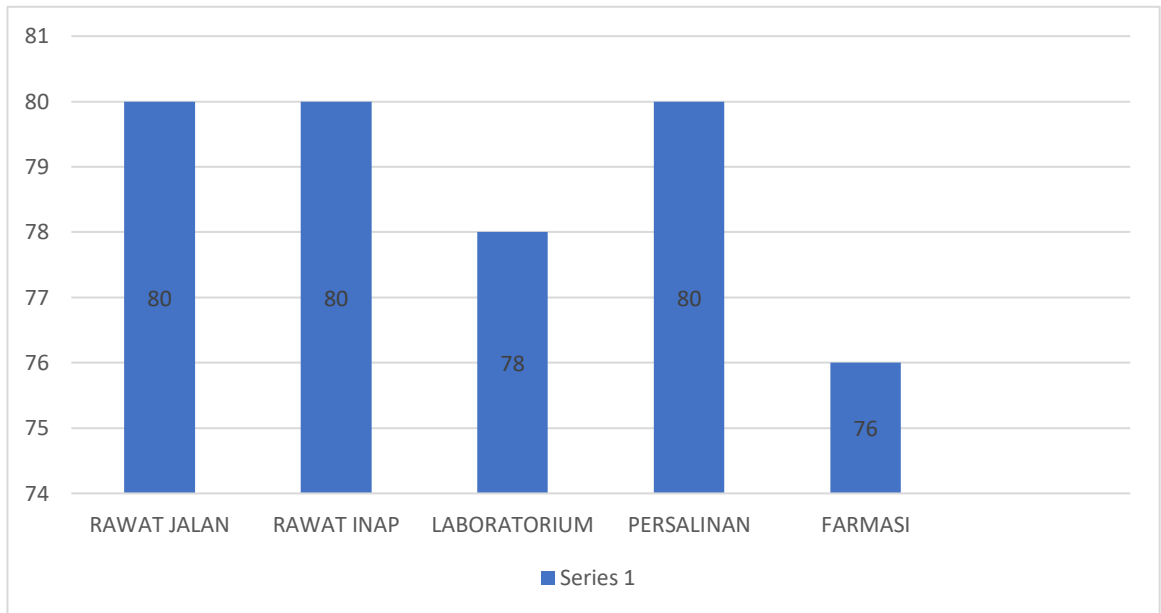
- **Kepuasan konsumen baik.**

Indikator ini mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah. Survey dilakukan setiap bulan oleh petugas RSUD yang ditunjuk Direktur. Sasarannya adalah paseln yang berkunjung ke tiap unit pelayanan. Jumlah perhitungan sample sesuai dengan pedoman tersebut diatas. Hasil yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 80% atau 100% dari target yang telah ditetapkan tahun 2023 yaitu 80%.

KEPUASAN KONSUMEN TAHUN 2023



KEPUASAN KONSUMEN PER UNIT TAHUN 2023



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, melalui indikator kinerja yang merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan penetapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2023.

Mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Ada 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU), ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama belum mencapai target sesuai yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Capaian Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Pada table 3.1 dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Bidang Kesehatan 2 (dua) indikator tidak mencapai target, hal itu disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan No.KG.01.10/B.III/552/2024 tentang penyampaian data Final Capaian kematian ibu bayi Tahun 2023 berdasarkan data MPDN (Maternal Perinatal Neonatal Death) bahwa Data kematian ibu bayi menggunakan Data alamat Domisili (AD) yaitu apabila sasaran sudah tinggal disuatu wilayah lebih dari 6 bulan tanpa melihat apakah terlayani atau tidak namun keluarga mengaku berdomisili di Kabupaten Sukabumi maka kasus kematian tersebut menjadi angka Kabupaten Sukabumi

Pada table 3.2 dapat dilihat pada perbandingan antara pencapaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja utama tahun 2023, dari 6 (enam) indikator kinerja utama program, ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama **belum mencapai target**. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja utama ini diantaranya adalah Kurang optimalnya Forum Desa Siaga disebabkan tidak ada dukungan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Forum dan Kader Desa Siaga.

Sedangkan dari 12 (dua belas) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada 7 (tujuh) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mencapai target. Hal itu disebabkan karena Regulasi dari PMK nomor 2 Tahun 2022 yang terlalu ribet untuk pengklaimannya, data sasaran yang tidak sesuai dengan data



dari kelurahan/desa/kecamatan, Kurangnya SDM pengelola program di Puskesmas, Kurangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan kurangnya kerja sama antara Lintas Sektor dan Lintas Program terkait serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan.

Rencana intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja yang belum mencapai target diantaranya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kinerja pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian target kinerja tersebut.

Salah satu strategi yang akan ditepuh dalam upaya pencapaian semua target yang belum tercapai adalah dengan melakukan revisi terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, sehingga indikator sasaran kinerja yang harus tercapai akan menjadi lebih akurat dan dapat diukur.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, Maret 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukabumi



AGUS SANUSI, SKM.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680817 200604 1 013